

**PENGARUH SOSIALISASI POLITIK KOMISI PEMILIHAN UMUM
(KPU) KOTA BANDAR LAMPUNG TERHADAP PEMBENTUKAN *CIVIC
LITERACY* PESERTA DIDIK SMAN 7 BANDAR LAMPUNG**

Oleh

**RIZKI FIRDAUS
NPM 2113032077**



**PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

ABSTRAK

PENGARUH SOSIALISASI POLITIK KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KOTA BANDAR LAMPUNG TERHADAP PEMBENTUKAN *CIVIC LITERACY* PESERTA DIDIK SMAN 7 BANDAR LAMPUNG

Oleh
Rizki Firdaus

Penelitian ini dilatar belakangi oleh pentingnya *Civic Literacy* (melek kewarganegaraan) bagi seluruh warga negara. Terkhusus di penelitian ini pada peserta didik SMAN 7 Bandar Lampung berkaitan dengan minimnya pemahaman politik yang dimiliki peserta didik dan kurangnya variasi dalam pendidikan politik di sekolah. Jika dibiarkan, hal ini dapat menimbulkan dampak negatif, seperti ideologi yang lemah, kurang melek terhadap isu politik akibat kurangnya bahan bacaan. Proses sosialisasi politik ini diharapkan dapat membentuk kepribadian yang positif dalam kehidupan berbangsa.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh sosialisasi politik Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bandar Lampung terhadap pembentukan *civic literacy* peserta didik di SMAN 7 Bandar Lampung. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan survei. Sampel penelitian adalah peserta sosialisasi yang terdiri dari 44 pengurus OSIS SMAN 7 Bandar Lampung tahun ajaran 2024/2025. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan angket sebagai teknik pokok dan wawancara sebagai teknik penunjang. Analisis data menggunakan uji regresi linier sederhana.

Hasil penelitian menunjukkan adanya pengaruh signifikan sosialisasi politik KPU terhadap pembentukan *civic literacy* dengan nilai koefisien determinasi sebesar 62,4%. Dapat diartikan bahwa pembentukan *civic literacy* dipengaruhi oleh sosialisasi politik KPU dan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain. Temuan penelitian ini menegaskan bahwa penggunaan metode interaktif termasuk simulasi tata cara pemilu, diskusi, dan kolaborasi antara KPU dengan pihak sekolah efektif dalam meningkatkan pengetahuan faktual dan kecakapan kognitif siswa tentang sistem politik dan proses demokrasi. Berdasarkan hasil tersebut, disarankan agar KPU dan sekolah terus memperkuat kerja sama serta memanfaatkan *platform digital* secara optimal untuk memperluas jangkauan dan memastikan keberlanjutan program pendidikan politik bagi generasi muda.

Kata Kunci: Sosialisasi, Politik, KPU, *Civic literacy*, Pendidikan Politik

ABSTRACT

THE INFLUENCE OF POLITICAL SOCIALIZATION BY THE GENERAL ELECTION COMMISSION (KPU) OF BANDAR LAMPUNG CITY ON THE FORMATION OF CIVIC LITERACY AMONG STUDENTS AT SENIOR HIGH SCHOOL 7 BANDAR LAMPUNG

By
Rizki Firdaus

This study was motivated by the importance of civic literacy for all citizens. Specifically, this study focused on students at SMAN 7 Bandar Lampung due to their lack of political understanding and the lack of variety in political education at school. If left unchecked, this could have negative impacts, such as weak ideology and a lack of awareness of political issues due to a lack of reading materials. This political socialization process is expected to shape positive personalities in the life of the state. The purpose of this study is to determine the influence of political socialization by the Bandar Lampung City General Election Commission (KPU) on the formation of civic literacy among students at SMAN 7 Bandar Lampung. This study used a quantitative method with a survey approach. The research sample consisted of 44 student council members of SMAN 7 Bandar Lampung for the 2024/2025 academic year. The data collection technique in this study used questionnaires as the main technique and interviews as a supporting technique. Data analysis used simple linear regression tests. The results of the study show that there is a significant effect of KPU political socialization on the formation of civic literacy with a coefficient of determination of 62.4%. This means that the formation of civic literacy is influenced by KPU political socialization and the rest is influenced by other factors. The findings of this study confirm that the use of interactive methods, including election procedure simulations, discussions, and collaboration between the KPU and schools, is effective in improving students' factual knowledge and cognitive skills about the political system and democratic processes. Based on these results, it is recommended that the KPU and schools continue to strengthen their cooperation and make optimal use of digital platforms to expand the reach and ensure the sustainability of political education programs for the younger generation.

***Keywords:* Socialization, Politics, KPU, Civic literacy, Political Education**

**PENGARUH SOSIALISASI POLITIK KOMISI PEMILIHAN UMUM
(KPU) KOTA BANDAR LAMPUNG TERHADAP PEMBENTUKAN *CIVIC
LITERACY* PESERTA DIDIK SMAN 7 BANDAR LAMPUNG**

Oleh:

Rizki Firdaus

(Skripsi)

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA PENDIDIKAN**

Pada

**Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial**



**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

Judul Skripsi

: PENGARUH SOSIALISASI POLITIK KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KOTA BANDAR LAMPUNG TERHADAP PEMBENTUKAN CIVIC LITERACY PESERTA DIDIK SMAN 7 BANDAR LAMPUNG

Nama Mahasiswa

: Rizki Firdaus

NPM

: 211303207

Program Studi

: Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Jurusan

: Pendidikan IPS

Fakultas

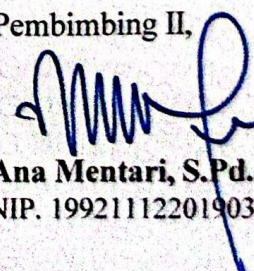
: Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Pembimbing I,



Dr. Muhammad Mona Adha, M.Pd.
NIP 197911172005011002

Pembimbing II,



Ana Mentari, S.Pd., M.Pd.
NIP. 199211122019032026

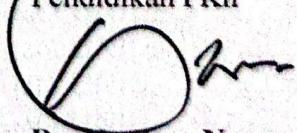
2. Mengetahui

Ketua Jurusan Pendidikan
Ilmu Pengetahuan Sosial



Dr. Dedy Miswar, S.Si., M.Pd.
NIP 197411082005011003

Koordinator Program Studi
Pendidikan PKn



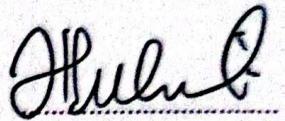
Dr. Yunisca Nurmala, M.Pd.
NIP 198706022008122001

MENGESAHKAN

1. Tim Pengaji

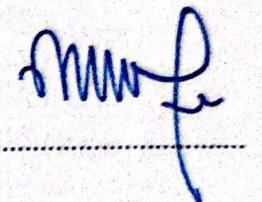
Ketua

: Dr. Muhammad Mona Adha, M.Pd.



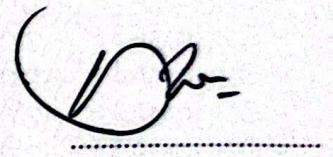
Sekretaris

: Ana Mentari, S.Pd., M.Pd.



Pengaji
Bukan Pembimbing

: Dr. Yunisca Nurmala, M.Pd.





Tanggal Lulus Ujian Skripsi: **12 November 2025**

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini, adalah :

Nama : Rizki Firdaus
NPM : 2113032077
Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Jurusan : Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial
Fakultas : Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Alamat : Jl. Kagungan Lontar Kidul No.17, Serang, Banten.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar sarjana disuatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Bandar Lampung, 24 November 2025



Rizki Firdaus
NPM. 2113032077

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Rizki Firdaus, dilahirkan di Serang pada tanggal 04 September 2003. Penulis merupakan anak keempat dari 4 (empat) bersaudara, dari pasangan bapak Walin dan Ibu Ihat Sutihat. Pendidikan formal yang telah ditempuh oleh penulis antara lain:

1. SD Negeri Lontar Baru yang diselesaikan pada tahun 2015.
2. SMP Negeri 15 Kota Serang yang diselesaikan pada tahun 2018.
3. SMA Negeri 3 Kota Serang yang diselesaikan pada tahun 2021.

Pada tahun 2021 penulis diterima sebagai mahasiswa Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung melalui jalur masuk Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN). Penulis pernah aktif dalam organisasi kemahasiswaan di antaranya yaitu di Forum Pendidikan Kewarganegaraan (FORDIKA) dan Himpunan Mahasiswa Banten (HMB).

Penulis pernah melaksanakan Kegiatan Studi Lapangan Ilmiah (KSLI) dengan tujuan Bali-Malang-Yogyakarta pada tahun 2023. Kemudian pada tahun 2024 penulis mengikuti Program Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Bumi Jaya, Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lampung Selatan, dan melaksanakan Program Pengenalan Lapangan Persekolahan (PLP) di UPT SMPN 1 Candipuro

MOTTO

“Dream it, Wish it, Do it-”

***“Don’t be pushed around by the fears in your mind. Be led by the dreams in
your heart.”***

(Roy T. Bennet)

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Bismillahirrahmanirrahim

Dengan mengucap puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kupersembahkan karya ini sebagai tanda cinta dan baktiku kepada:

Kedua orang tua hebatku, Bapak Walin dan Ibu Ihat Sutihat yang sangat aku sayangi dan aku cintai. Terima kasih telah merawat dan menjagaku dengan penuh kasih sayang dan cinta yang tulus, yang selalu mendoakanku sukses di dunia dan juga di akhirat, yang selalu memberikan dukungan, serta jerih payah pengorbanan di setiap tetes keringat demi keberhasilanku. Aku tentu tidak bisa membala semua yang kalian berikan namun aku selalu berusaha untuk selalu membuat kalian tersenyum bangga memiliki diriku dan tak lupa pula aku selalu memohon kepada Allah SWT. Agar orang tuaku selalu diberikan kesehatan dan umur panjang agar dapat menemani perjalananku untuk membahagiakan mereka kelak.

*Serta
Almamaterku tercinta Universitas Lampung*

SANWANCANA

Puji syukur kepada Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Pengaruh Sosialisasi Politik Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bandar Lampung Terhadap Pembentukan Civic literacy Peserta Didik SMAN 7 Bandar Lampung”**. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Pendidikan Universitas Lampung.

Terselesaikannya skripsi ini tentu tidak terlepas dari hambatan yang datang dari luar maupun dari dalam diri penulis. Berkat bimbingan, saran, motivasi dan bantuan baik moral maupun spiritual serta arahan dari berbagai pihak sehingga segala kesulitan dapat terlewati dengan baik. Dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Albet Maydiantoro, S.Pd., M.Pd., selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. Riswandi, M.Pd., Selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kerjasama Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung;
3. Bapak Bambang Riadi, S.Pd., M.Pd., selaku Wakil Dekan Bidang Keuangan dan Umum Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung;
4. Bapak Hermi Yanzi, S.Pd., M.Pd., selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung;
5. Bapak Dr. Dedy Miswar, S.Si., M.Pd., selaku Ketua Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung;
6. Ibu Dr. Yunisca Nurmala, M.Pd., selaku Koordinator Program Studi PPKn Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung.

7. Bapak Dr. Muhammad Mona Adha, M.Pd., selaku Pembimbing I. Terima kasih banyak atas saran dan masukannya serta motivasi dan semangat yang diberikan;
8. Ibu Ana Mentari, S.Pd., M.Pd., selaku Pembimbing Akademik (PA) dan sebagai Pembimbing II. Terima kasih banyak atas saran dan masukannya serta motivasi dan semangat yang diberikan;
9. Ibu Dr. Yunisca Nurmala, M.Pd., selaku Pembahas I. Terima kasih banyak atas saran dan masukannya serta motivasi dan semangat yang diberikan;
10. Bapak Edi Siswanto, S.Pd., M.Pd., selaku Pembahas II. Terima kasih banyak atas saran dan masukannya serta motivasi dan semangat yang diberikan;
11. Bapak dan Ibu Dosen beserta Staf program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung, terima kasih banyak atas ilmu yang telah diberikan, motivasi dan semangat serta bantuan yang juga selalu diberikan;
12. Terima kasih kepada Kepala Sekolah, Peserta Didik, Guru dan seluruh staf di SMA Negeri 7 Bandar Lampung, yang telah memberikan izin penelitian dan atas segala bantuan yang diberikan dalam penyelesaian skripsi ini;
13. Bapak H. Umar Singgih, S.Pd., M.M. selaku kepala SMA Negeri 7 Bandar Lampung. Terima kasih banyak telah memberikan izin penelitian dan atas segala bantuan yang diberikan dalam penyelesaian skripsi ini;
14. Ibu Hetty Hermiyati, M.Pd. selaku guru sekaligus penanggung jawab kegiatan sosialisasi politik, Terimakasih telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
15. Teristimewa untuk kedua orang tuaku tercinta, Bapak Walin dan Ibu Ihat Sutihat. Terima kasih banyak atas ketulusan, keikhlasan, kasih sayang dan kesabaran yang diberikan kepadaku. Terima kasih untuk segala dukungan baik dalam bentuk moril maupun materil. Semoga Allah SWT. selalu

melimpahkan nikmat sehat dan senantiasa menjaga kalian dalam rahmat, keimanan dan ketaqwaan

16. Terimakasih kepada keluarga saya tercinta teteh saya Yunita Fitrianingsih dan Hana Hanifah, kakak saya Achmad Supriyanto, Kakak Ipar saya Aep Bahendri dan Yayah Badriyah, beserta semua keluarga besarku yang tidak dapat disebutkan satu persatu;
17. Terima kasih kepada Teman-teman program studi PPKn Angkatan 2021 yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Terima kasih atas kebersamaannya selama ini;
18. Terima kasih kepada sahabat perjuanganku Rachmat Hidayat, Aqsol Hadi, Fatkhan Afiful Akbar, Ilham Nur Fauzan, M. Ilham Syafa'at, Ahmad Nur' Afief Dwianugraha, Nanda Santoby, Muhammad Bagaskara, dan Rendi Firandika. Terima kasih untuk semangat dan motivasi yang kalian berikan dalam pengerjaan skripsi ini;
19. Terimakasih kepada sobat kost rumah hijau, KTH, dan YBY Geng, Ibu Puji, Abel, Jerry, Gipang, Ade, Pikry, Kinanti, Mukti, Farhan, Jikri. Terimakasih telah menjadi tempat yang nyaman untuk berkeluh kesah selama ini;
20. Terima kasih untuk semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah banyak membantu sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Semoga ketulusan bapak, ibu, serta rekan-rekan semua mendapatkan pahala dari Allah SWT.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan penyajiannya. Akhirnya penulis berharap semoga dengan kesederhanaannya skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

DAFTAR ISI

| | |
|------------------------------------------|--------------|
| ABSTRAK | i |
| ABSTRACT..... | ii |
| PERSETUJUAN..... | iv |
| LEMBAR PENGESAHAN | v |
| LEMBAR PERNYATAAN | vi |
| RIWAYAT HIDUP..... | vii |
| MOTTO | viii |
| PERSEMBERAHAN..... | ix |
| SANWANCANA..... | x |
| DAFTAR ISI | xiii |
| DAFTAR GAMBAR | xvi |
| DAFTAR TABEL | xvii |
| DAFTAR LAMPIRAN | xviii |
| 1. PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Identifikasi Masalah | 12 |
| C. Batasan Masalah..... | 12 |
| D. Rumusan masalah..... | 12 |
| E. Tujuan Penelitian..... | 13 |
| F. Manfaat Penelitian..... | 13 |
| 1. Manfaat Secara Teoritis | 13 |
| 2. Manfaat Secara Praktis | 13 |
| G. Ruang Lingkup Penelitian | 14 |
| 1. Ruang Lingkup Ilmu | 14 |
| 2. Ruang Lingkup Objek Penelitian..... | 14 |
| 3. Ruang Lingkup Subjek Penelitian | 14 |
| 4. Ruang Lingkup Tempat Penelitian..... | 14 |
| 5. Ruang Lingkup Waktu Penelitian | 14 |
| 2. TINJAUAN PUSTAKA | 15 |

| | | |
|-----------|---------------------------------------------------|-----------|
| A. | Deskripsi Teori | 15 |
| 1. | Tinjauan Umum Tentang Sosialisasi politik | 15 |
| 2. | Tinjauan Umum Tentang <i>Civic literacy</i> | 26 |
| B. | Kajian Penelitian Yang Relevan | 31 |
| C. | Kerangka Berpikir | 34 |
| 3. | METODOLOGI PENELITIAN | 36 |
| A. | Jenis Penelitian | 36 |
| B. | Populasi dan Sampel | 36 |
| 1. | Populasi..... | 36 |
| 2. | Sampel | 37 |
| C. | Variabel Penelitian..... | 38 |
| 1. | Variabel Bebas | 38 |
| 2. | Variabel Terikat..... | 38 |
| D. | Definisi Konseptual dan Operasional | 39 |
| 1. | Definisi Konseptual | 39 |
| 2. | Definisi Operasional | 39 |
| E. | Rencana Pengukuran Variabel..... | 40 |
| F. | Teknik Pengumpulan Data | 40 |
| 1. | Teknik Pokok | 40 |
| 2. | Teknik Penunjang | 41 |
| G. | Uji Validitas dan Reliabilitas | 41 |
| 1. | Uji Validitas | 41 |
| 2. | Uji Reliabilitas | 42 |
| H. | Teknik Analisis Data..... | 44 |
| 1. | Analisis Data Frekuensi | 44 |
| 2. | Uji Prasyarat | 45 |
| 3. | Analisis Data..... | 45 |
| 4. | HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN | 48 |
| A. | Gambaran Umum dan Lokasi Penelitian..... | 48 |
| 1. | Profil SMAN 7 Bandar Lampung..... | 48 |

| | | |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 2. | Sarana dan Prasarana | 48 |
| 3. | Visi dan Misi SMAN 7 Bandar Lampung | 49 |
| 4. | Data Guru dan Tenaga Pendidik | 49 |
| B. | Deksripsi Data Uji Coba Instrumen | 49 |
| 1. | Pelaksanaan Uji Validitas..... | 50 |
| 2. | Pelaksanaan Uji Reliabilitas | 53 |
| C. | Deskripsi Data Penelitian | 55 |
| 1. | Pengumpulan Data..... | 55 |
| 2. | Penyajian Data | 55 |
| D. | Uji Prasyarat | 69 |
| 1. | Uji Linearitas | 69 |
| E. | Analisis Data | 70 |
| 1. | Uji Regresi Linear Sederhana | 70 |
| 2. | Uji Koefiesien Determinasi | 71 |
| F. | Pembahasan Hasil Penelitian..... | 72 |
| 1. | Sosialisasi Politik (Variabel X) | 72 |
| 2. | <i>Civic literacy</i> (Variabel Y) | 80 |
| 3. | Pengaruh Sosialisasi Politik KPU Terhadap Pembentukan <i>Civic literacy</i> Peserta didik SMAN 7 Bandar Lampung..... | 84 |
| 5. | KESIMPULAN DAN SARAN | 93 |
| A. | Kesimpulan..... | 93 |
| B. | Saran | 94 |
| DAFTAR PUSTAKA..... | | 95 |

DAFTAR GAMBAR

| Gambar | Halaman |
|---------------------------------------------------------|----------------|
| Gambar 1.1 Survei Ketertarikan Politik..... | 5 |
| Gambar 1.2 Ketertarikan Responden Menyeluruh..... | 6 |
| Gambar 1.3 Ketertarikan Berdasarkan Generasi..... | 6 |
| Gambar 1.4 Ketertarikan Berdasarkan Pendidikan | 7 |
| Gambar 1.5 Survei Penilaian Politik..... | 8 |
| Gambar 1.6 Penilaian Politik Responden Menyeluruh | 8 |
| Gambar 1.7 Penilaian Berdasarkan Generasi..... | 9 |
| Gambar 1.8 Penilaian Berdasarkan Pendidikan | 9 |
| Gambar 2.1 Kerangka Berpikir | 35 |

DAFTAR TABEL

| Table | Halaman |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Tabel 3.1 Populasi Peserta Didik SMAN 7 Bandar Lampung Tahun Ajaran 2024/2025..... | 37 |
| Tabel 3.2 Indeks Koefisien Reliabilitas | 43 |
| Tabel 3.3 Persentase data frekuensi | 45 |
| Tabel 3.4 Pedoman interpretasi Koefisien Determinasi | 47 |
| Tabel 4.1 Hasil Uji Validitas Angket (Variabel X) Kepada 10 Responden di luar sampel | 50 |
| Tabel 4.2 Hasil Uji Validitas Angket (Variabel Y) Kepada 10 Responden di luar sampel | 52 |
| Tabel 4.3 Hasil uji Reliabilitas Variabel X oleh 10 responden diluar sampel | 53 |
| Tabel 4.4 Hasil uji Reliabilitas Variabel Y oleh 10 responden diluar sampel | 54 |
| Tabel 4.5 Distribusi Frekuensi Indikator <i>Who</i> | 57 |
| Tabel 4.6 Distribusi Frekuensi indicator <i>Learns What</i> | 59 |
| Tabel 4.7 Distribusi Frekuensi Indikator <i>From Whom</i> | 61 |
| Tabel 4.8 Distribusi Frekuensi Indikator <i>Under What Circumstances</i> | 63 |
| Tabel 4.9 Distribusi Frekuensi Indikator <i>With What Effect</i> | 65 |
| Tabel 4.10 Distribusi Frekuensi Indikator Pegetahuan Faktual | 67 |
| Tabel 4.11 Distribusi Frekuensi Indikator Kecakapan Kognitif..... | 69 |
| Tabel 4.12 Hasil Uji Lineaitas dengan bantuan SPSS..... | 70 |
| Tabel 4.13 Hasil Uji Linearitas Dengan Bantuan SPSS..... | 70 |
| Tabel 4.14 Hasil Perhitungan R kuadrat Menggunakan SPSS..... | 71 |

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran

| |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lampiran 1 Surat Izin Penelitian Pendahuluan KPU Kota Bandar Lampung |
| Lampiran 2 Surat balasan penelitian pendahuluan KPU Kota Bandar Lampung..... |
| Lampiran 3 Surat Izin penelitian pendahuluan di SMAN 7 Bandar Lampung..... |
| Lampiran 4 Surat telah melaksanakan peneltian pendauluan di SMAN 7 Bandar Lampung |
| Lampiran 5 Surat izin penelitian di SMAN 7 Bandar Lampung |
| Lampiran 6 Dokumentasi Penelitian Pendahuluan |
| Lampiran 7 Dokumentasi Peneliitian Wawancara Peserta didik |
| Lampiran 8 Hasil Wawancara dengan A.M.A (11.4) |
| Lampiran 9 Hasil wawancara dengan S.A (11.1)..... |
| Lampiran 10 Hasil Wawancara dengan A.Z.D (10.3) |
| Lampiran 11 Hasil wawancara dengan A.R.Z (11.1) |
| Lampiran 12 Hasil Uji Validitas & Reliabilitas angket Variabel X (Sosialisasi Politik)..... |
| Lampiran 13 Hasil Uji Validitas & Reliabilitas Variabel Y (<i>Civic literacy</i>) |
| Lampiran 14 Data uji validitas & reliabilitas Variabel X..... |
| Lampiran 15 Data Uji validitas dan reliabilitas Variabel Y |
| Lampiran 16 Data uji angket Variabel X..... |
| Lampiran 17 Data Uji angket Variabel Y |

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Era globalisasi dan modernisasi saat ini, pemahaman dan keterlibatan dalam proses politik semakin penting, terutama bagi generasi muda yang akan menjadi pemimpin masa depan. *Civic literacy* atau Literasi kewarganegaraan merujuk pada kemampuan warga negara untuk memahami, mengevaluasi, dan terlibat dalam urusan politik dan tata kelola negara. Tingkat literasi kewarganegaraan yang kuat di kalangan siswa sekolah menengah atas dianggap sebagai faktor krusial dalam membangun masyarakat demokratis yang mampu menilai informasi politik dan aktif berpartisipasi dalam kehidupan kewarganegaraan. Penerapan literasi kewarganegaraan bertujuan untuk mengatasi tantangan nasional, terutama di kalangan siswa dan pemuda yang rentan terhadap pengaruh budaya asing. Literasi kewarganegaraan memfasilitasi pengembangan individu yang mampu mengatasi tantangan nasional dalam konteks kehidupan nasional dan negara.

Berdasarkan data dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bandar Lampung terkait Pemilihan Umum 2024, populasi Generasi Z (individu berusia 17-24 tahun) berjumlah 146.479 pemilih, yang mewakili 18% dari Daftar Pemilih Tetap (DPT) keseluruhan sebanyak 790.125 orang. (Kirka.Co). Sebagian besar peserta didik ikut serta dalam proses pemilu untuk pertama kalinya. Prevalensi pemilih pemula begitu tinggi sehingga partai politik seringkali memprioritaskan mereka sebagai fokus utama kampanye mereka. Penting bagi KPU untuk dapat mempercepat upayanya dalam menyebarluaskan pengetahuan melalui inisiatif pendidikan yang ditujukan bagi pemilih pemula ini. KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilu di Indonesia, memainkan peran penting dalam pendidikan demokrasi melalui inisiatif sosialisasi politiknya. Upaya sosialisasi politik KPU dirancang untuk menumbuhkan pemahaman yang mendalam tentang kerangka politik,

mekanisme pemilu, hak dan kewajiban warga negara, serta memfasilitasi akses mudah ke informasi melalui platform digital dan media sosial. Akses mudah ke informasi ini sejalan dengan konsep *Civic literacy* yang mencerminkan keterlibatan individu dalam memahami, menganalisis, dan mendapatkan informasi.

Berdasarkan konteks global, literasi kewarganegaraan telah menjadi perhatian utama berbagai negara demokratis. Menurut *International Association for the Evaluation of Educational Achievement* (IEA), *civic literacy* mencakup tidak hanya pengetahuan faktual tentang sistem politik, tetapi juga kemampuan berpikir kritis tentang isu-isu sipil seperti keadilan sosial, demokrasi, dan hak asasi manusia. Studi komparatif menunjukkan bahwa negara-negara dengan tingkat literasi kewarganegaraan tinggi cenderung memiliki partisipasi politik yang lebih aktif dan sistem demokrasi yang lebih stabil. Hal ini menunjukkan bahwa investasi dalam pendidikan politik generasi muda bukan hanya kebutuhan nasional, tetapi juga tuntutan era global yang mengharuskan warga negara memiliki kompetensi untuk berpartisipasi dalam kehidupan demokratis yang semakin kompleks. Dalam konteks pendidikan formal, sekolah berperan sebagai agen sosialisasi politik yang strategis karena dapat menyampaikan nilai-nilai politik secara terstruktur dan sistematis kepada peserta didik. Kolaborasi antara institusi pendidikan dengan lembaga negara seperti KPU memperkuat efektivitas proses sosialisasi politik terhadap pembentukan kesadaran *civic literacy* generasi muda.

Civic literacy dianggap fundamental dalam membangun pemahaman kokoh mengenai prinsip demokrasi dalam dinamika politik saat ini dikarenakan komponen yang di dalamnya menurut *Civic Centrre Education (CCE)* , yakni pengetahuan warga negara (*civic knowledge*), keterampilan warga negara (*civic skills*) dan watak warga negara (*civic dispostition*). Komponen yang ada di dalam *Civic literacy* merupakan nilai yang dianggap penting bagi setiap warga negara.

Pengetahuan warga negara dapat diperoleh melalui membaca, membaca adalah suatu kegiatan yang melibatkan proses berpikir. Sedangkan keterampilan kewarganegaraan termasuk keterampilan intelektual. Menurut Lia (Putri, Et al, 2021) ini dapat berarti bahwa untuk menjadi warga negara yang demokratis tentu harus memiliki pengetahuan yang cukup, dalam hal ini, pengetahuan dapat diperoleh dari pendidikan formal di bangku sekolah. Namun di era sekarang sebuah pengetahuan dapat kita peroleh dari mana saja baik melalui internet, maupun sumber lain. Literasi dapat membantu warga negara dalam meningkatkan kemampuan berpikir, sehingga mampu memahami berbagai permasalahan dengan kritis dan memiliki upaya dalam memberikan solusi. Menjadi warga negara yang memiliki pengetahuan luas akan membantu mereka dalam meningkatkan kemampuan berpikir. Mereka mampu memahami berbagai permasalahan dengan kritis dan mampu berupaya dalam melakukan penyelesaiannya.

Berdasarkan Rapor Pendidikan Indonesia 2023 kemampuan literasi siswa SMA di Indonesia berada dalam kategori sedang, dengan hanya 49,26% siswa mencapai kompetensi minimum dengan literasi angka yang turun 4,59% dari tahun sebelumnya. Penurunan ini mencakup aspek literasi dasar hingga lanjut, seperti kemampuan memahami teks kompleks dan berpikir kritis, yang menjadi pondasi literasi politik. Walaupun Kemendikbudristek telah melaksanakan program distribusi buku untuk mendorong peningkatan minat membaca, hambatan berupa keterbatasan akses terhadap bahan bacaan yang bermutu serta kurang optimalnya sosialisasi yang sistematis di lingkungan sekolah masih menjadi penghalang signifikan bagi kemajuan (Ashari, 2023).

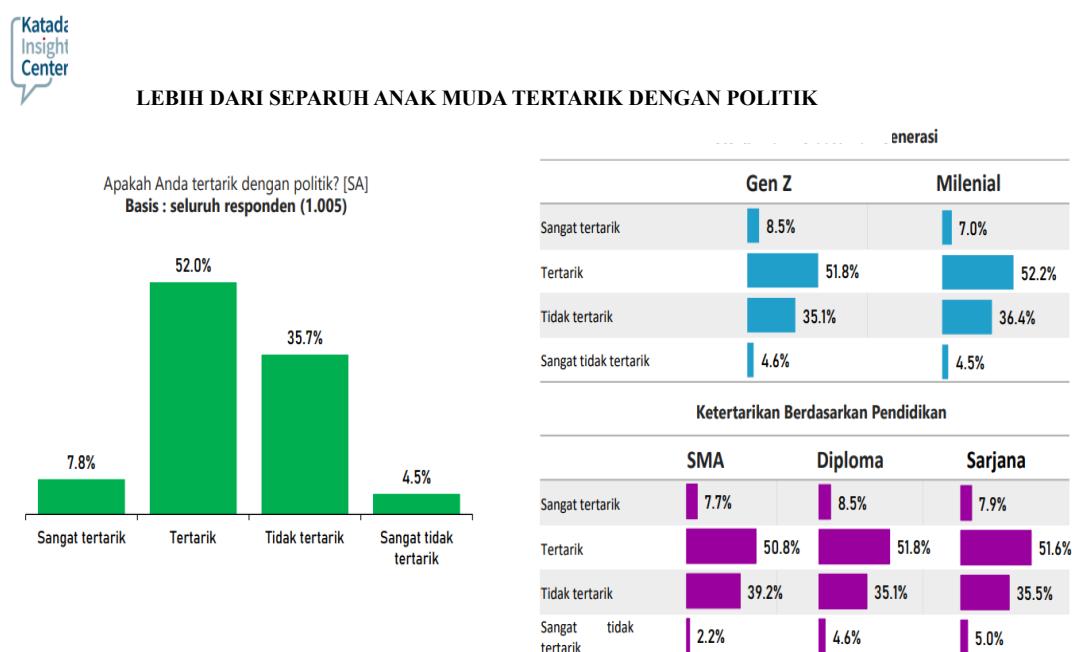
Berdasarkan *research* yang peneliti dapatkan untuk di Kota Bandar Lampung, meskipun data spesifik terkait tingkat literasi politik siswa SMA belum tersedia, Pemerintah Provinsi Lampung tetap menunjukkan komitmen dalam mendorong penguatan literasi umum melalui peningkatan kunjungan ke perpustakaan daerah. Berdasarkan data terbaru Pemprov Lampung, jumlah kunjungan ke perpustakaan regional meningkat signifikan dari 18.103 pada tahun 2023 menjadi 46.636 pada tahun 2024, yang melibatkan partisipasi

siswa, tenaga pendidik, serta masyarakat luas. Sejalan dengan itu, jumlah anggota aktif perpustakaan juga mengalami pertumbuhan, dari 986 orang pada tahun 2023 menjadi 2.944 orang pada tahun 2024. Peningkatan tersebut mencerminkan meningkatnya antusiasme publik terhadap pemanfaatan layanan perpustakaan, baik secara fisik maupun digital, sekaligus menunjukkan dukungan terhadap penyelenggaraan kegiatan literasi, termasuk Festival Budaya dan Literasi 2025 dengan tema “*Culture Literary Festival 2025: Ngulik Literasi – Dare To Dream, Be Innovative.*”

Tantangan utama dalam pembentukan *civic literacy* di era digital adalah kemampuan generasi muda dalam memverifikasi dan menganalisis informasi politik yang diterima dari berbagai sumber media. Penelitian menunjukkan bahwa literasi digital berperan penting dalam memperluas akses informasi politik yang valid serta melatih kemampuan berpikir kritis. Generasi Z dan milenial sebagai pengguna aktif media sosial memerlukan keterampilan khusus untuk membedakan antara informasi yang kredibel dengan hoaks atau disinformasi politik. Dalam konteks ini, sosialisasi politik oleh KPU tidak hanya berfungsi sebagai transfer pengetahuan, tetapi juga sebagai platform pembelajaran literasi digital yang membekali peserta didik dengan kemampuan mengakses, mengevaluasi, dan memanfaatkan informasi politik secara bertanggung jawab.

Realitasnya remaja, khususnya Generasi Z dan Milenial, dituntut untuk memiliki kompetensi literasi digital yang mumpuni. Peserta didik pada jenjang sekolah menengah termasuk dalam kelompok usia yang intensif memanfaatkan media sosial, sehingga diharapkan mampu mengembangkan keterampilan literasi yang memadai sesuai dengan regulasi yang berlaku. Sebagai bagian dari pengguna internet, siswa tidak hanya dituntut untuk menguasai pemanfaatan media digital sebagai sarana, tetapi juga menunjukkan kemampuan dalam mengakses, mengelola, dan menggunakan media tersebut secara bijak dan bertanggung jawab.

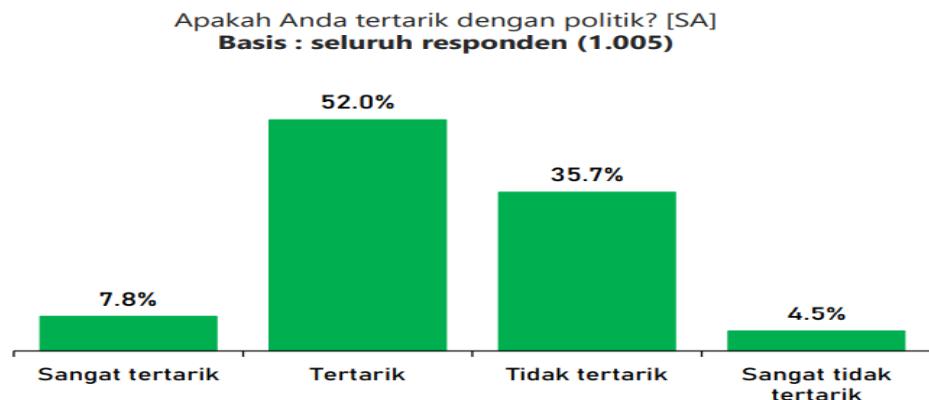
Penelitian ini didorong oleh beberapa fenomena dan tantangan yang terjadi di Indonesia. Pertama, Antusiasme tinggi generasi muda dalam politik bertolak belakang dengan minat yang rendah terhadap literasi di kalangan Gen Z. Kedua, adanya indikasi bahwa banyak peserta didik yang belum memiliki pemahaman yang memadai tentang proses politik dan pemilu. Ketiga, masih banyak anak muda yang memandang politik secara negatif. (Katadata Insight Center /KIC, 2023). Berikut penulis sajikan beberapa data terkait dengan permasalahan tersebut:



Gambar 1.1 Survei Ketertarikan Politik

Sumber; Katadata Insight Center (KIC), 2023.

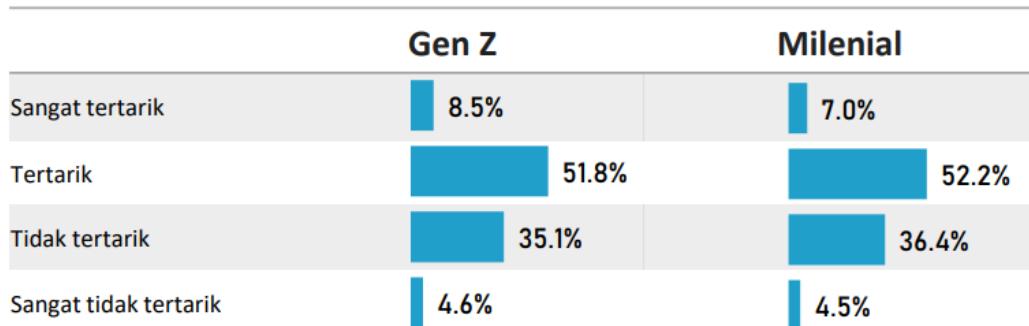
Berdasarkan gambar 1.1 survei menunjukkan bahwa lebih dari separuh anak muda di Indonesia tertarik pada politik, dengan tingkat ketertarikan yang serupa antar generasi dan tidak terlalu dipengaruhi oleh tingkat pendidikan. Meskipun ada sejumlah yang tidak tertarik, minat terhadap politik tetap cukup tinggi di kalangan anak muda.



Gambar 1.2 Ketertarikan Responden Menyeluru

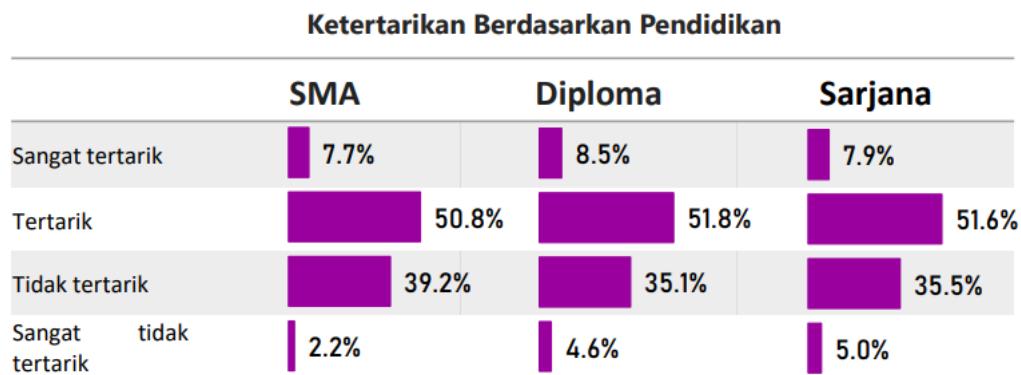
Berdasarkan gambar 1.2 menampilkan tingkat ketertarikan responden (total 1.005 orang) terhadap politik secara keseluruhan. Sebagian besar responden menyatakan tertarik pada politik, dengan 52% mengatakan "tertarik" dan 7,8% "sangat tertarik", sementara 40,2% tidak tertarik (35,7% tidak tertarik dan 4,5% sangat tidak tertarik). Ini menunjukkan lebih dari separuh anak muda memiliki ketertarikan terhadap politik.

Ketertarikan Berdasarkan Generasi



Gambar 1.3 Ketertarikan Berdasarkan Generasi

Berdasarkan gambar 1.3 yaitu membandingkan tingkat ketertarikan politik berdasarkan generasi Gen Z dan Milenial. Persentase yang tertarik dan sangat tertarik hampir serupa antara kedua generasi, yaitu sekitar 60,3% pada Gen Z dan 59,2% pada Milenial. Tingkat ketidak tertarikan juga relatif sama, di kisaran 39-40%. Hal ini menunjukkan bahwa baik Gen Z maupun Milenial memiliki minat yang relatif sebanding terhadap politik.

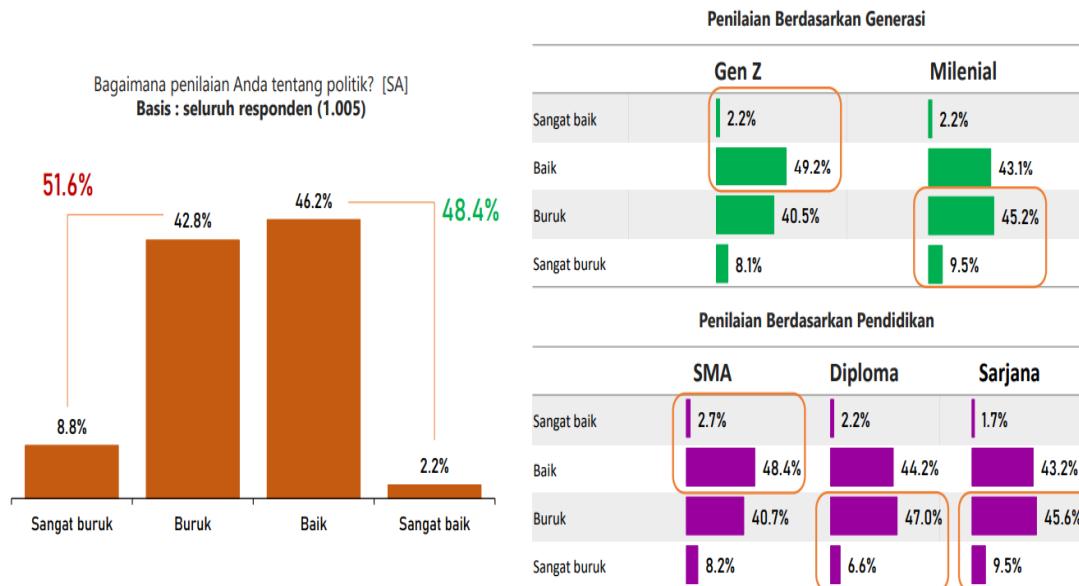


Gambar 1.4 Ketertarikan Berdasarkan Pendidikan

Berdasarkan gambar 1.4 tentang menguraikan ketertarikan politik berdasarkan tingkat pendidikan. Responden dengan pendidikan SMA menunjukkan 58,5% tertarik atau sangat tertarik, dengan 41,4% tidak tertarik. Responden diploma dan sarjana memiliki tingkat ketertarikan yang serupa, masing-masing sekitar 60-60,1%. Tingkat ketidak tertarikan menurun sedikit seiring dengan peningkatan pendidikan. Ini mengindikasikan bahwa ketertarikan pada politik cenderung konsisten, terlepas dari tingkat pendidikan.

Fenomena antara tingginya ketertarikan politik dengan rendahnya literasi politik di kalangan generasi muda mencerminkan gap antara minat dan kapasitas. Studi menunjukkan bahwa pendidikan kewarganegaraan yang berbasis partisipatif terbukti paling berhasil dalam membentuk sikap serta perilaku politik yang positif dibandingkan dengan berbagai jenis intervensi lainnya. Hal ini mengindikasikan perlunya transformasi pendekatan sosialisasi politik dari yang bersifat informatif menjadi lebih interaktif dan eksperiensial. KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilu memiliki posisi strategis untuk mengisi gap ini melalui program-program inovatif yang tidak hanya meningkatkan pengetahuan faktual peserta didik, tetapi juga mengembangkan kecakapan kognitif mereka dalam menganalisis isu-isu politik kontemporer.

LEBIH BANYAK ANAK MUDA YANG MENILAI POLITIK ITU BURUK



Gambar 1.5 Survei Penilaian Politik

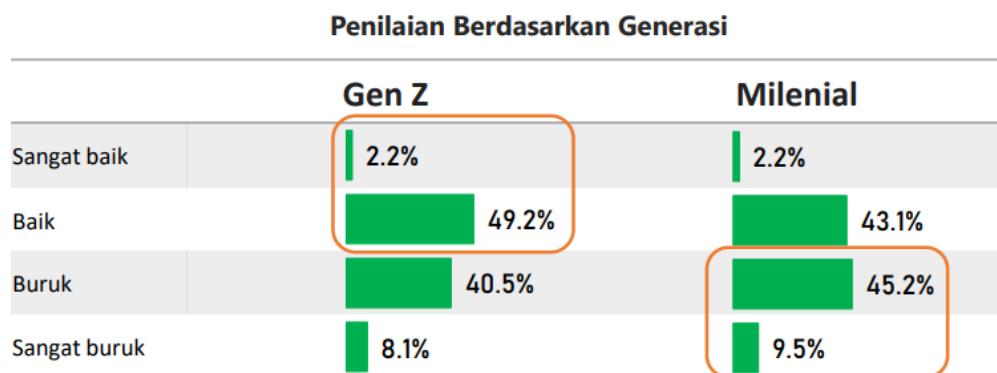
Sumber : Katadata Insight Center (KIC), 2023.

Berdasarkan gambar 1.5 survei menunjukkan bahwa lebih banyak anak muda yang menilai politik itu buruk. Apabila ditinjau menurut generasi, Milenial cenderung lebih banyak memberikan penilaian negatif terhadap politik, sedangkan Gen Z lebih banyak yang menilai positif. Di sisi lain, analisis berdasarkan tingkat pendidikan menunjukkan bahwa semakin tinggi jenjang pendidikan responden, semakin besar pula proporsi yang menilai politik secara negatif.



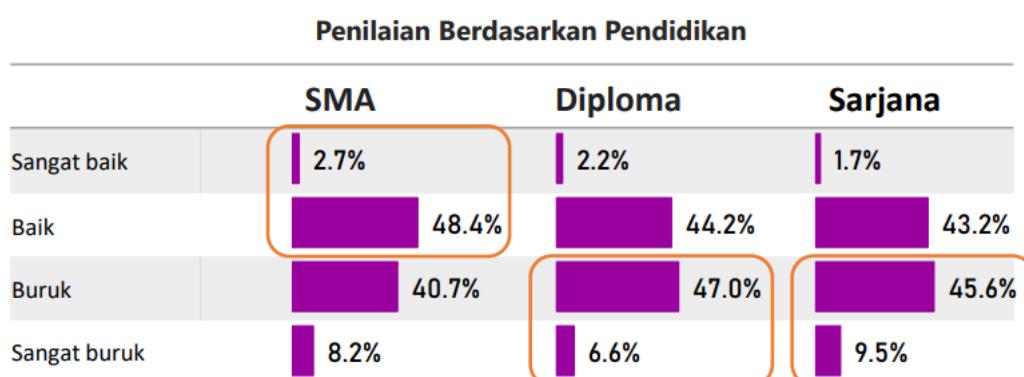
Gambar 1.6 Penilaian Politik Responden Menyeluru

Berdasarkan gambar 1. 6 menunjukkan persepsi responden (total 1.005 orang) terhadap politik secara umum. Sebagian besar responden (51,6%) menilai politik itu buruk, yang terdiri dari 42,8% mengatakan buruk dan 8,8% sangat buruk. Sementara 48,4% menilai politik itu baik, dengan 46,2% mengatakan baik dan hanya 2,2% sangat baik. Ini menunjukkan ada kecenderungan responden lebih negatif dalam menilai politik.



Gambar 1.7 Penilaian Berdasarkan Generasi

Berdasarkan gambar 1.7 terkait dengan membandingkan penilaian politik berdasarkan generasi Gen Z dan Milenial. Hanya 2,2% dari kedua generasi yang menilai politik sangat baik. Namun, persentase yang menganggap politik buruk dan sangat buruk lebih tinggi pada generasi Milenial (54,7%) dibanding Gen Z (48,6%). Hal ini mengindikasikan generasi Milenial cenderung lebih pesimis terhadap politik dibanding Gen Z.



Gambar 1.8 Penilaian Berdasarkan Pendidikan

Berdasarkan gambar 1.8 menunjukkan penilaian politik berdasarkan tingkat pendidikan. Responden dengan pendidikan SMA sebagian besar menilai politik baik (48,4%), namun 48,9% menilai buruk atau sangat buruk.

Responden dengan pendidikan Diploma lebih banyak menilai politik buruk atau sangat buruk (53,6%) dibanding yang menilai baik (46,4%). Sedangkan responden sarjana memiliki persepsi negatif paling tinggi, dengan 55,1% menilai politik buruk atau sangat buruk, dan hanya 44,9% menilai baik. Hal ini mengindikasikan semakin tinggi tingkat pendidikan, kecenderungan untuk melihat politik secara negatif meningkat.

Berdasarkan fenomena dan data yang telah diuraikan, SMAN 7 Bandar Lampung telah mengimplementasikan pendidikan politik melalui mekanisme pemilihan ketua OSIS, yang mencakup rangkaian kegiatan seperti kampanye serta penyampaian pidato visi dan misi calon di aula sekolah, disertai dengan kunjungan ke setiap kelas untuk memperoleh dukungan. Proses ini memberikan pengalaman langsung kepada siswa dalam memahami prinsip-prinsip demokrasi, termasuk pelaksanaan hak pilih, kebebasan dalam menentukan pilihan, serta pemahaman mengenai tanggung jawab baik sebagai pemilih maupun calon pemimpin.

Untuk memperdalam pemahaman politik siswa, diperlukan penyelenggaraan pendidikan politik tambahan, misalnya melalui sosialisasi yang melibatkan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Langkah ini bertujuan agar kesadaran politik siswa dapat berkembang secara optimal melalui proses sosialisasi yang terstruktur, mengingat kesadaran politik merupakan aspek yang dapat dipelajari dan diajarkan. Dalam konteks ini, sekolah memegang peranan penting sebagai agen sosialisasi politik bagi siswa. Dengan membangun kolaborasi bersama KPU, lembaga pendidikan dapat menyediakan pendidikan politik yang lebih komprehensif sehingga mendukung peningkatan kesiapan dan kesadaran siswa dalam berpartisipasi pada proses demokrasi.

Berdasarkan hasil penelitian awal yang dilaksanakan di SMAN 7 Bandar Lampung, peneliti telah melakukan wawancara dengan pendidik yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan sosialisasi serta guru mata

pelajaran PPKn. Dari hasil wawancara tersebut diperoleh informasi bahwa kegiatan sosialisasi politik yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bandar Lampung diikuti oleh 43 peserta didik yang tergabung dalam organisasi OSIS. Dalam kegiatan ini, KPU memberikan pemahaman komprehensif mengenai aspek-aspek esensial dalam ranah politik, khususnya menjelang pelaksanaan pemilihan umum, seperti pemilihan kepala daerah di Kota Bandar Lampung maupun kaiannya dengan pemilihan osis di sekolah. Tidak hanya penyampaian materi, peserta didik juga diberikan kesempatan untuk melakukan praktik, termasuk simulasi tata cara pencoblosan, prosedur memilih yang benar, serta peningkatan kemampuan dalam menyaring informasi guna menghindari penyebaran hoaks terkait calon yang akan dipilih. Kegiatan ini sejalan dengan implementasi Program Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5) dalam Kurikulum Merdeka di SMAN 7 Bandar Lampung yang mengusung tema “Suara Demokrasi”.

Hasil observasi dan wawancara peneliti dengan peserta didik terkait pengetahuan faktual mengenai pemerintahan menunjukkan bahwa empat dari lima narasumber tidak mampu menyebutkan secara rinci instansi pemerintahan yang bergerak di bidang politik. Kondisi ini mencerminkan masih rendahnya tingkat literasi informasi peserta didik. Dalam proses pemilihan OSIS ditemukan adanya peserta didik yang memilih untuk tidak menggunakan hak suaranya (golput). Dalam hal menyampaikan aspirasi melalui kotak aspirasi, tingkat partisipasi siswa dalam menyampaikan pendapat maupun usulan kepada pendidik dan tenaga kependidikan tetap rendah. Efektivitas peningkatan partisipasi politik tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor pendukung, di antaranya kerja sama antara KPU dan guru PPKn dalam mengintegrasikan materi sosialisasi ke dalam pembelajaran berbasis kurikulum, serta dukungan dari pihak sekolah dalam memfasilitasi kegiatan yang relevan.

Permasalahan yang terjadi di SMAN 7 Bandar Lampung berkaitan dengan minimnya pemahaman politik yang dimiliki peserta didik dan kurangnya variasi dalam pendidikan politik di sekolah. Jika dibiarkan, hal ini dapat

menimbulkan dampak negatif, seperti ideologi yang lemah, kurang melek terhadap isu politik akibat kurangnya bahan bacaan, serta tingginya angka golput, seperti yang terlihat dalam pemilihan OSIS. Oleh karena itu, penting untuk meneliti bagaimana sosialisasi politik yang dilakukan oleh KPU berpengaruh dalam membentuk literasi kewarganegaraan peserta didik SMAN 7 Bandar Lampung. Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka peneliti tertarik untuk meneliti tentang: **“Pengaruh Sosialisasi Politik Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bandar Lampung Terhadap Pembentukan Civic literacy Peserta didik SMAN 7 Bandar Lampung”**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka peneliti dapat mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

- 1) Terdapat peserta didik yang belum memiliki pemahaman yang memadai tentang proses politik akibat dari rendahnya *Civic literacy*.
- 2) Kurangnya program Pendidikan Politik yang variatif
- 3) Tingginya tingkat antusiasme dalam politik, tetapi masih rendahnya minat literacy pada pemuda
- 4) Masih banyaknya pemuda yang menganggap politik itu kurang baik
- 5) Rendahnya partisipasi politik peserta didik, dilihat dari masih adanya golput dalam pemilihan OSIS dan Kotak aspirasi yang kurang peminat.

C. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah disebutkan di atas, maka batasan masalah penelitian ini adalah Pengaruh sosialisasi politik KPU kota Bandar Lampung terhadap pembentukan *Civic literacy* peserta didik SMAN 7 Bandar Lampung.

D. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang, Identifikasi, dan pembatasan masalah yang ada, maka dalam penelitian dapat dirumuskan masalahnya adalah Bagaimana

sosialisasi politik KPU berperngaruh terhadap pembentukan *Civic literacy* peserta didik SMAN 7 Bandar Lampung?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan pengaruh sosialisasi politik KPU terhadap pembentukan *Civic literacy* peserta didik SMAN 7 Bandar Lampung.

F. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi terhadap ilmu pengetahuan khususnya pada bidang keilmuan Pendidikan politik dan kenegaraan. Penelitian ini dapat menjadi referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan literasi kewarganegaraan, pendidikan politik, dan partisipasi pemilih, serta memberikan arah bagi penelitian di bidang ini di masa depan.

2. Manfaat Secara Praktis

a. Bagi Peneliti

Untuk mengetahui dan megembangkan pemahaman yang lebih mendalam tentang *Civic literacy*, sosialisasi politik, dan dapat dijadikan referensi penelitian selanjutnya

b. Bagi Sekolah

Penelitian ini diharapkan dapat bagi sekolah untuk terus membentuk kesadaran politik dan program sosialisasi yang lebih efektif kedepannya.

c. Bagi Peserta didik

Melalui penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk peserta didik yang akan lebih termotivasi untuk berpartisipasi dalam pemilu dan kegiatan politik lainnya

G. Ruang Lingkup Penelitian

1. Ruang Lingkup Ilmu

Penelitian ini termasuk dalam ruang lingkup ilmu Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, dengan wilayah kajian Pendidikan Politik dan Kenegaraan. Karena mengkaji Peran Sosialisasi politik Komisi Pemilihan Umum (KPU) terhadap peningkatan *Civic literacy* peserta didik.

2. Ruang Lingkup Objek Penelitian

Ruang lingkup objek dalam penelitian ini adalah Pengaruh Sosialisasi Politik yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) kota Bandar Lampung dengan tujuan membentuk *Civic literacy* di SMAN 7 Bandar Lampung

3. Ruang Lingkup Subjek Penelitian

Ruang lingkup Subjek dalam penelitian ini adalah Peserta sosialisasi yakni OSIS SMAN 7 Bandar Lampung.

4. Ruang Lingkup Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan di SMAN 7 Bandar Lampung yang beralamat Jl. Teuku Cik Ditiro No.2, Beringin Raya, Kec. Kemiling, Kota Bandar Lampung, Lampung 35158

5. Ruang Lingkup Waktu Penelitian

Pelaksanaan penelitian di lapangan dengan membawa surat izin penelitian dari Dekan Fakultas dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung dengan Nomor : 5678/UN26.13/PN.01.00/2024 setelah surat pengantar dari dekan, selanjutnya melakukan pra penelitian yang dilaksanakan tanggal 06 Agustus 2024.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Deskripsi Teori

1. Tinjauan Umum Tentang Sosialisasi politik

a. Pengertian Sosialisasi Politik

Untuk memahami sosialisasi politik, seseorang harus terlebih dahulu memahami konsep sosialisasi. Sosialisasi adalah proses intrinsik yang dialami setiap individu untuk memperoleh pengetahuan, nilai, atau keterampilan yang diperlukan untuk beradaptasi dan berinteraksi dengan lingkungan. Sosialisasi adalah tindakan yang melibatkan transmisi nilai atau budaya kepada masyarakat. Selain itu, penting bagi warga negara untuk memahami konsep politik. Konsep politik berasal dari akal manusia dan secara inheren bersifat abstrak. Oleh karena itu, memahami konsep politik memungkinkan individu untuk membedakan, menjelaskan, menyimpulkan, mengkategorikan, memberikan contoh, dan merespons setelah mempelajari politik.

Sosialisasi politik dipengaruhi oleh lingkungan sosial, ekonomi, dan budaya di mana individu berada, serta interaksi antara kepribadian dan pengalaman. Dalam beberapa hal, sosialisasi politik merupakan konsep dasar dalam bidang sosiologi politik. Sosialisasi politik dapat didefinisikan sebagai proses penyampaian pengetahuan, sikap, nilai, dan norma perilaku sosial yang berkaitan dengan politik guna mendorong partisipasi aktif dalam kehidupan politik. Pemahaman para ahli sosialisasi politik (Damsar, 2010), yakni diantarnya:

- 1) M. Rush dan P. Althoff (2003)

Dalam bukunya Sosiologi Politik, Sosialisasi politik

merupakan suatu proses memperkenalkan sistem politik pada seseorang, dan bagaimana orang tersebut menentukan tanggapan serta reaksi terhadap gejala politik.

2) Thio (1989)

Dalam bukunya *Sociology: an Introduction*, sosialisasi politik merupakan proses yang dilakukan individu-individu untuk memperoleh pengetahuan, kepercayaan-kepercayaan dan sikap politik

3) Gabriel A. Almond

Dalam buku Perbandingan Sistem Politik, Sosialisasi politik adalah bagian dari proses sosialisasi yang khusus untuk membentuk nilai-nilai politik, yang menunjukkan bagaimana seharusnya masing-masing anggota berpartisipasi dalam sistem politiknya.

Berdasarkan pendapat-pendapat para ahli diatas maka dapat disimpulkan bahwa sosialisasi Politik adalah suatu proses untuk memberikan pengetahuan terhadap seorang atau kelompok masyarakat mengenai sistem politik agar masyarakat memiliki kesadaran untuk ikut serta dalam kehidupan politik.

b. Tujuan Sosialisasi Politik

Sosialisasi politik mengandung unsur pendidikan politik yang mampu membentuk serta menanamkan kepribadian serta kesadaran dalam berpolitik, sebagaimana pendapat menurut (Vontz; Adha, 2021) warga negara harus memiliki kemampuan dan pengetahuan agar bisa berpartisipasi dalam kehidupan politik, hal-hal berkaitan dengan kepentingan umum dan aspek-aspek lain, secara harfiah partisipasi berarti keikutsertaan, untuk memaknai partisipasi dalam konteks politik dapat dikatakan sebagai bentuk keikutsertaan masyarakat dalam berbagai proses politik, sehingga perilaku tersebut dapat diterima dan dipraktikkan dalam sistem politik. Berikut adalah tiga aspek tujuan sosialisasi politik:

1) Membangun Kepribadian Politik

Tahap ini sosialisasi politik berorientasi memberikan pendidikan mengenai pemahaman isi dan penghayatan atas nilai-nilai yang dianut oleh suatu negara, pemahaman mengenai etos normatif yang dijadikan sebagai landasan dalam membina dan mengembangkan diri sehingga membentuk kepribadian dalam berkehidupan dalam ranah politik. Melalui pendidikan politik, masyarakat diharapkan menjadi warga negara yang memiliki keterampilan serta bertanggung jawab dalam berkehidupan berbangsa dan bernegara. dilandaskan atas nilai dan norma yang berlaku.

2) Kesadaran Politik

Kesadaran merupakan kondisi psikologis yang mana seseorang tanggap pada suatu hal, jika dalam bahasan politik hal tersebut adalah kondisi politik atau iklim politik suatu bangsa. Mampu merangsang kesadaran masyarakat untuk menelaah permasalahan politik secara kritis dan rasional.

3) Partisipasi Aktif

Sosialisasi politik bertugas menyadarkan fungsi politik yang dimiliki oleh setiap individu sehingga merubah sikap seseorang untuk memiliki keinginan yangkuat dalam berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab dalam proses politik,seperti aktif dalam kelembagaan partai politik dan lain-lain.

Melalui penjelasan tujuan sosialisasi politik, dapat disimpulkan bahwa tujuan sosialisasi politik pada dasarnya adalah memberikan pengetahuan kepada individu ataupun kelompok mengenai betapa pentingnya sebagai anggota warga negara untuk ikut serta dalam penyusunan pemerintahan dan aktif dalam berbagai kehidupan politik yang ada melalui hal-hal kecil, misalnya dengan menjadi anggota partai (kader), ikut serta memberikan suara dalam kegiatan

pemilihan umum, ataupun menjadi peserta kampanye suatu partai politik.

c. Metode Sosialisasi Politik

Menurut Dawson (Haryanto,2018) bahwa sebagai suatu proses, sosialisasi politik dibagi menjadi dua tahap. Pada tahap pertama dibentuk suatu *general predisposition* dan tahap berikutnya *general predisposition* yang ditransfer ke objek-objek politik yang lebih khusus. Dalam pelaksanaan sosialisasi politik dibagi menjadi 2 metode, yaitu langsung dan tidak langsung. Dalam sosialisasi politik secara langsung dipilah menjadi 4 yaitu *imitation* (imitasi), *anticipatory political socialization* (sosialisasi politik antisipatoris), *political education (edukasi politik)* dan *political experiences* (pengalaman politik).

1) Imitasi

Imitasi (*Imitation*) merupakan prosesi sosialisasi politik yang paling awal dilakukan. Berbentuk peniruan setiap nilai, kepercayaan, sikap serta harapan politik, proses ini dinamakan sosialisasi primer yang mana merupakan langkah pertama dalam membentuk identitas seseorang. Proses peniruan terbagi menjadi dua yaitu peniruan pasif dan peniruan kreatif, jika peniruan pasif meniru dengan seutuhnya.Sedangkan peniruan kreatif melakukan peniruan dengan cara dimodifikasi sesuai dengan kemauan setiap individu.

2) Sosialisasi Politik Antisipatoris

Sosialisasi politik antisipatoris (*Anticipatory Political Socialization*) adalah proses seseorang dalam mempersiapkan pengetahuan akan nilai, sikap maupun tingkah laku yang berhubungan dengan posisi ataupun jabatan tertentu. Seperti contohnya anggota legislatif terpilih yang mempelajari dan mematangkan peranan mereka ketika ditugaskan untuk

memberikan pelayanan kepada masyarakat berdasarkan penentuan kedudukan profesi.

3) Edukasi atau Pendidikan Politik

Edukasi (*Political Education*) metode ini merupakan upaya nyata untuk mensosialisasikan nilai-nilai, sikap maupun orientasi politik kepada khalayak banyak. Kegiatan ini biasa dilaksanakan oleh agen sosialisasi seperti sekolah, partai politik, pemerintah dan lain sebagainya. Kontak-kontak politik yang dilakukan secara langsung antara agen-agen sosialisasi politik diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai wawasan dalam berbangsa dan bernegara. Selaras Kegiatan ini juga mencerminkan strategi pendidikan demokrasi berbasis simulasi, atau yang disebut experiential learning (Kolb, 1984). Metode sosialisasi ini merupakan metode yang paling sesuai untuk digunakan dalam pembahasan penelitian, melihat peranan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam memberikan sosialisasi politik melalui berbagai metode seperti seminar, diskusi santai, rapat kerja, dan ceramah. Jika dilihat melalui penjelasan mengenai beberapa jenis sosialisasi politik, sosialisasi politik Komisi Pemilihan Umum tergolong dalam jenis sosialisasi pendidikan politik.

4) Pengalaman Politik

Pengalaman politik (*Political Experience*) yang dimiliki setiap individu dapat membentuk sikap dan orientasi orang tersebut. Pengalaman politik lebih memiliki ruang yang lebih longgar mengenai kemungkinan seseorang dalam memperoleh pemahaman mengenai politik bergantung pada aktivitas seseorang dalam arena politik. Sehingga intensitas seseorang dalam berperan aktif dalam dunia politik maka akan semakin banyak pula pengalaman politik yang diperolah. Dalam metode

sosialisasi langsung jenis ini kritisitas seseorang sangat berperan penting.

Dalam sosialisasi tidak langsung dipilih menjadi 3 metode, yaitu *interpersonal transference, apprenticeship, dan, generalization*

1) Pemindahan antarpribadi (*interpersonal transference*)

Dia berpendapat bahwa *interpersonal transference* memiliki hubungan yang kuat dengan isu-isu psikokultural. Penerapan transference interpersonal sering digunakan untuk menjelaskan perkembangan orientasi individu sebagai penerima sosialisasi terhadap keberadaan otoritas. Diasumsikan bahwa pandangan individu terhadap otoritas politik dipengaruhi oleh interaksi awal yang dijalani dengan pemegang otoritas nonpolitik, seperti orang tua atau pendidik. Dari hubungan yang demikian, individu-individu tersebut memperoleh pemahaman untuk mengembangkan pengalaman dan menerapkannya saat berhadapan dengan otoritas politik. Individu tersebut akan mengalihkan emosinya kepada para pemegang kekuasaan, yang sering kali berlandaskan pada interaksi awal yang terjalin saat ia membangun hubungan dengan otoritas nonpolitik.

Kesimpulan yang dihasilkan menunjukkan bahwa sikap individu terhadap otoritas bersifat dinamis, terbentuk melalui interaksi yang mendalam dengan pihak-pihak yang memegang otoritas di luar ranah politik. Orientasi awal ini berfungsi sebagai fondasi bagi pembentukan orientasi terhadap otoritas politik.

2) Magang (*apprenticeship*)

Apprenticeship atau magang memiliki hubungan yang signifikan dengan *interpersonal transference*. Magang, yang terkait dengan *interpersonal transference*, memerlukan proses transfer pengalaman yang telah dikembangkan dari kehidupan nonpolitik ke dalam konteks kehidupan politik. Berbeda dengan “*interpersonal transference*,” sosialisasi politik melalui

magang berlangsung melalui proses yang terkait dengan nilai-nilai yang dipegang oleh struktur atau pengorganisasian di lingkungan magang. Dalam konteks ini, individu akan mendapatkan nilai, sikap, atau pandangan yang ada dan diterapkan oleh organisasi kerja.

Secara keseluruhan, melalui proses magang, individu dapat mengakumulasi pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai yang relevan untuk diterapkan dalam konteks politik atau dalam pengambilan keputusan politik. Magang dapat dianggap sebagai suatu proses yang memungkinkan individu untuk memperoleh pengalaman secara langsung. Jumlah pengalaman yang diperoleh akan berbanding lurus dengan keuntungan yang dapat diraih oleh individu tersebut. Jumlah pengalaman yang dimiliki individu berfungsi sebagai referensi yang dapat dijadikan dasar dan bahan pertimbangan dalam menjalankan peran politik.

3) Generalisasi (*generalization*)

Generalisasi berkaitan erat dengan proses sosialisasi yang telah dibahas sebelumnya, yaitu transferensi interpersonal atau magang. Namun, dalam generalisasi, terdapat perluasan nilai-nilai sosial terhadap objek politik. Artinya, perspektif individu yang berakar pada nilai-nilai sosial terintegrasi dalam keseluruhan sistem keyakinan yang dimiliki, termasuk keyakinan politik. Nilai, sikap, atau keyakinan dan pandangan yang bersifat umum dan nonpolitik ditanamkan sebagai keyakinan, yang selanjutnya menjadi dasar untuk melakukan penilaian politik. Sehubungan dengan hal tersebut, perlu dicatat bahwa proses sosialisasi dalam bentuk generalisasi sering kali mengemukakan asumsi yang menyamaratakan penilaian, serta mengandung stereotip atau stigmatisasi.

d. Agen Sosialisasi politik

Istilah agen pertama kali diperkenalkan oleh seorang sosiolog terkemuka yang menjelaskan mengenai konsep agen dalam masyarakat. Menurut Giddens, menjadi seorang manusia berarti menjadi seorang agen dengan tindakan disengaja, memiliki alasan-alasan atas aktivitasnya, dan mampu jika diminta mengelaborasi secara diskursif (*berdasarkan pemikiran logis*) alasan-alasan itu.

Menurut Gabriel A. Almond menggunakan istilah agen dalam menjelaskan pelaku sosialisasi politik sehingga merujuk pada agen sosialisasi politik. Menurutnya agen sosialisasi politik terdapat 6 yaitu;

“(1) keluarga; (2) kelompok bergaul; (3) pekerjaan; (4) media massa; (5) kontak-kontak politik langsung; (6) sekolah.”

Keberadaan beberapa agen sosialisasi politik tersebut menurut Almond yang nantinya akan mempengaruhi budaya politik. Untuk mengetahui lebih jelas mengenai setiap agen sosialisasi politik, maka di bawah ini merupakan kesimpulan dan penjelasan mengenai macam-macam agen sosialisasi politik.

1) Keluarga

Keluarga memainkan peran yang krusial dalam proses sosialisasi nilai politik kepada warga negara atau individu, karena keluarga memiliki kesempatan untuk mentransmisikan nilai-nilai politik kepada individu, terutama pada masa kanak-kanak (Efriza, 2012). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa secara tidak sengaja, pembicaraan mengenai politik yang dilakukan oleh orang tua dalam konteks keluarga dapat menumbuhkan ketertarikan anak terhadap bidang tersebut. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa dampak terhadap sikap politik anak cenderung lebih signifikan dibandingkan dengan pengaruh dari agen sosialisasi politik lainnya.

2) Sekolah

Institusi pendidikan, sebagai agen sosialisasi politik, mengedukasi generasi muda mengenai dunia politik dan peran mereka di dalamnya, serta memberikan pemahaman yang lebih jelas tentang lembaga-lembaga politik dan interaksi politik.

Selain itu, sekolah berfungsi sebagai "saluran pewarisan" nilai-nilai dan sikap kepada masyarakat (Sahid, 2010).

Menurut Efriza (2012), pendidikan dianggap sebagai salah satu variabel krusial dalam menjelaskan perilaku politik, yang secara tidak langsung membuktikan bahwa pendidikan berperan penting sebagai agen sosialisasi politik. Hal ini dapat dimengerti karena di sekolah, anak-anak akan menjalani proses pendidikan yang terstruktur dan sistematis, di mana nilai-nilai politik dapat disampaikan secara langsung maupun tidak langsung oleh pendidik kepada peserta didik. Secara langsung, pendidik dapat menyampaikan nilai-nilai politik yang terkandung dalam materi pelajaran melalui komunikasi selama proses pembelajaran. Secara tidak langsung, nilai-nilai politik dapat diintegrasikan ke dalam kurikulum atau buku bacaan.

Dengan demikian, baik secara sadar maupun tidak sadar, anak tersebut telah mengalami proses sosialisasi politik.

3) Kelompok Teman Sebaya

Menutut Horton and Hunt (Efriza, 2012) menjelaskan kelompok teman sebaya merupakan suatu kelompok dari orang-orang yang seusia dan memiliki status yang sama dalam mengembangkan sikap dan perilaku seseorang sehingga dapat memberikan pengaruh tergantung dengan siapa seseorang tersebut umumnya berhubungan atau bergaul.

4) Kelompok Kerja

Faktor lain yang memengaruhi kesempatan seseorang untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan adalah situasi di tempat kerja. Struktur kekuasaan di tempat kerja dapat

dianggap sebagai elemen yang sangat signifikan dan terdefinisi dengan jelas, di mana setiap individu berinteraksi setiap hari, baik secara sadar maupun tidak. Hal ini berpotensi memengaruhi sikap dan perilaku mereka.

Sahid (2010) menjelaskan bahwa pekerjaan dalam organisasi formal maupun informal yang terbentuk berdasarkan lingkungan kerja, seperti serikat buruh, juga berfungsi sebagai saluran komunikasi yang menyampaikan informasi dan keyakinan dengan jelas. Rekan kerja di sini akan memberikan input yang berupa dorongan untuk memilih sesuai dengan kecenderungan tempat kerjanya.

5) Partai Politik

Salah satu fungsi partai politik adalah dapat memainkan peran sebagai sosialisasi politik dalam bentuk pendidikan politik. Ini berarti bahwa setelah partai politik simpatisannya secara periodik maupun saat kampanye, partai politik dapat menanamkan nilai-nilai dan norma-norma melalui sosialisasi politik pada suatu generasi ke generasi lainnya agar dapat disampaikan lagi kepada masyarakat yang lebih luas.

6) Media Massa

Menurut Robinson (Kweit. 1986) media mempunyai dampak terhadap orientasi politik tertentu seperti peran yang kita harapkan dari pejabat pemerintah. Diketahui bahwa media massa, surat kabar, radio, televisi, dan majalah memegang peranan penting dalam menularkan sikap-sikap dan nilai-nilai kepada bangsa-bangsa mereka, termasuk sikap dan nilai politik seseorang (Sahid, 2010).

7) Pemerintah

Pemerintah merupakan agen sosialisasi *secondary group* yang punya kepentingan langsung atas sosialisasi politik. Pemerintah biasanya melibatkan diri dalam politik pendidikan yang ditujukan

untuk memperkenalkan seseorang kepada sistem politik negara, pemimpin, lagu kebangsaan, dan sejenisnya. Pemerintah juga secara tidak langsung melakukan sosialisasi politik melalui tindakan-tindakannya. Tindakan yang dimaksud yaitu salah satunya melalui lembaga yang memang memiliki tugas sosialisasi sebagaimana ketentuan yang telah ditetapkan.

8) Kontak-Kontak Politik Langsung

Terlepas dari nilai-nilai positif yang ditanamkan oleh keluarga, lembaga pendidikan, dan berbagai agen sosialisasi, perspektif seseorang tetap dapat mengalami perubahan jika mereka merasakan perasaan diabaikan atau tidak dihargai.

Perspektif seseorang tetap dapat berkembang jika mereka merasakan diabaikan atau menghadapi unsur-unsur merugikan yang berdampak negatif pada diri mereka sendiri dan lingkungannya. Selain itu, ketidakresponsifan badan pemerintahan terhadap kebutuhan individu dan kelompok, atau perasaan tertipu selama kampanye pemilihan, dapat secara signifikan melemahkan komitmen mereka untuk mematuhi hukum dan kerangka politik yang lebih luas. Akibatnya, interaksi politik langsung adalah faktor yang secara langsung mempengaruhi kecenderungan individu untuk mendukung atau mengabaikan kerangka politik yang berlaku.(Handoyo, 2013).

Berdasarkan beberapa agen sosialisasi politik yang dikemukakan di atas, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bandar Lampung termasuk ke dalam kategori pemerintah yang tergabung dalam badan *ad hoc*, dan SMAN 7 Bandar Lampung termasuk dalam kategori sekolah. Pemerintah melakukan tindakan-tindakannya salah satunya bisa melalui lembaga yang memang memiliki tugas sosialisasi sebagaimana ketentuan yang telah ditetapkan.

e. Indikator Sosialisasi politik

Dalam penerapan sosialisasi politik. Elemen yang dikemukakan Langton (1969) menyangkut tiga hal, yaitu:

“Pertama, proses sosialisasi politik memerlukan elemen seperti agen atau aktor, sebagai pihak yang aktif memberikan materi sosialisasi. Kedua, harus dipastikan ada materi yang akan diberikan. Materi atau isi yang dimaksud tidak melulu soal politik tetapi bisa juga mengenai hal lain, asalkan mampu memengaruhi sikap dan perilaku individu terhadap politik. Ketiga, harus ada interaksi antara agen dengan target sosialisasi. Dalam proses ini, interaksi bisa menentukan proses penerimaan, bahkan penolakan materi sosialisasi politik.”

Memperkuat pendapat yang dijabarkan Langton, perlu pula menyimak pernyataan Laswell (1972) bahwa dalam proses sosialisasi politik perlu memperhatikan beberapa point, yaitu:

“(a) who, (b) learns what, (c) from whom, (d) under what circumstances, and (e) with what effects.”

Pernyataan Laswell menekankan proses sosialisasi melibatkan dua pihak, yakni pemberi dan penerima materi sosialisasi. Interaksi tersebut merupakan proses pembelajaran tentang materi tertentu yang berlangsung pada kondisi tertentu dan akan berdampak tertentu pula dalam bidang politik. (Haryanto,2018).

Berdasarkan berbagai pendapat tentang sosialisasi politik, dapat ditarik benang merah bahwa dalam proses sosialisasi politik terdapat beberapa hal yang harus dipenuhi. Harus ada pihak yang menyampaikan materi, mencermati metode yang dipakai saat proses sosialisasi politik, serta memperhatikan target atau sasaran sosialisasi.

2. Tinjauan Umum Tentang *Civic literacy*

a. Pengertian *Civic literacy*

Civic literacy adalah pengetahuan dan keterampilan seorang warga negara untuk mengatasi permasalahan negara seperti halnya masalah sosial, politik dan kenegaraan. *Civic literacy* meliputi

pengetahuan mengenai suatu negara, pemerintahannya, peran warga negara, kewajiban warga negara serta hak sebagai warga negara. Secara sederhana berdasarkan *Civic Centre Education* (1994) kemampuan yang menjadi komponen dalam *Civic literacy* adalah: 1) Pengetahuan warga negara (*civic knowledge*) seperti Sosialisasi memberikan informasi tentang hak dan kewajiban pemilih, mekanisme pemilu, 2) Keterampilan warga negara (*civic skills*) seperti kegiatan praktis simulasi pemilu , dan 3) Karakter warga negara (*civic disposition*) seperti adanya interaksi dengan narasumber KPU sehingga membentuk sikap positif terhadap demokrasi (misal kepercayaan pada proses pemilu), serta peserta didik terdorong untuk berpikir kritis terhadap isu politik lokal/nasional.

Menurut Suryadi (Raharjo, dkk., 2017) *Civic literacy* adalah suatu pengetahuan dan bentuk kemampuan warga negara dalam mengatasi permasalah yang terjadi pada aspek sosial, politik dan kenegaraan yang merupakan sebuah tuntutan warga negara untuk dapat bertindak secara otonom. Pengetahuan akan negara menjadi suatu keharusan bagi individu untuk dapat memahami apa yang sedang terjadi di negaranya,

Berdasarkan beberapa pendapat dari para ahli dapat disimpulkan bahwa *Civic literacy* dapat dipahami sebagai pengetahuan, keterampilan, dan sikap warga negara yang diperlukan untuk berpartisipasi secara efektif dalam kehidupan politik dan kenegaraan. *Civic literacy* mencakup pemahaman tentang sistem pemerintahan, hak dan kewajiban sebagai warga negara, serta kemampuan untuk terlibat dalam proses politik dan pembuatan kebijakan.

b. Urgensi *Civic literacy* dalam Pendidikan

Pada prinsipnya, *Civic literacy* erat kaitanya dengan pendidikan kewarganegaraan. Namun begitu pendidikan kewarganegaraan seringkali dilakukan dalam ranah formal seperti pada sekolah dan perguruan tinggi. *Civic literacy* memiliki tujuan yang mulia dan sejalan dengan pendidikan kewarganegaraan (*civic education*). Kedua hal ini tidak dapat dipisahkan, karena keduanya memiliki tujuan yang sama yaitu membentuk suatu pribadi warga negara yang baik (*good citizenship*).

Civic literacy dalam konsep Pendidikan Kewarganegaraan merupakan kemampuan warga negara dalam mengasah aspek pengetahuan, keterampilan serta nilai dan sikap, yang tentunya berkaitan dengan kemelekan informasi, dengan berbagai isu yang berhubungan dengan status warganegara, contohnya isu kebijakan pemerintah, politik, demokrasi yang bisa didapatkan dengan membaca informasi dari berbagai sumber, menulis dan menghasilkan karya tulis dari buah pemikiran yang sudah didapatkannya.

Civic literacy sangat perlu untuk terus digalakan dikalangan masyarakat, pada anak-anak, pemuda maupun orang tua. Hal ini sebagai bentuk usaha untuk menanggulangi permasalahan yang akan terus muncul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Usaha penguatan *Civic literacy* pada dasarnya telah dilaksanakan di ranah formal melalui pendidikan kewarganegaraan di sekolah dan perguruan tinggi, namun masih jarang dilakukan di kalangan non formal. Seharusnya, *Civic literacy* dapat diinformasikan atau dipublikasikan melalui media apapun, baik itu formal maupun informal, dengan adanya literasi kewarganegaraan yang tinggi, warga negara tidak akan mudah terbawa oleh isu-isu yang tidak jelas kebenarannya, dan warga negara menjadi lebih kritis serta hati-hati dalam menyikapi suatu

fenomena atau persoalan. Sehingga dengan demikian kekhawatiran tentang perpecahan, perang saudara, dan lain sebagainya karena adanya perkembangan teknologi dapat disiasati dengan peningkatan literasi kewarganegaraan bagi setiap warga negara

Proses pelaksanaan literasi kewarganegaraan di sekolah melalui dua tahap. Pertama melalui proses pembelajaran dan melalui kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler. Dalam proses pembelajaran, kegiatan literasi kewarganegaraan melalui proses kegiatan pelajaran PPKn yang mengaitkan materi pelajaran dengan memberikan tugas kepada peserta didik dan juga mengunjungi pengadilan Negeri, LSM dan DPR yang menurut salah satu kegiatan yang mendukung literasi kewarganegaraan. Literasi kewarganegaraan juga dilakukan melalui kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler seperti pramuka dan menyanyikan lagu nasional dan daerah. Selain itu juga melalui kegiatan-kegiatan yang di isi oleh lembaga negara seperti TNI, Kejaksaan, DPR, BNN dan juga KPU yang mensosialisasikan tentang hak dan kewajiban warga negara di dalam pemilihan umum (PEMILU).

c. Indikator *Civic literacy*

Menurut Milner (Rahman, 2016) untuk menilai tingkat literasi kewarganegaraan, terdapat dua indikator utama, yakni pengetahuan faktual (*Factual Knowledge*) dan kecakapan kognitif (*Cognitive Proficiency*):

- 1) Pengetahuan faktual mengacu pada pemahaman mengenai sistem politik dan pemerintahan negara masing-masing. Karena itu, tidak ada instrumen standar untuk mengukur tingkat pengetahuan faktual ini. Namun, sejumlah pertanyaan umum sering diajukan di berbagai negara, seperti mengenai jabatan politik terpenting di negara mereka (perdana menteri, menteri keuangan, menteri lainnya), serta meminta responden menyebutkan nama dan afiliasi politik dari individu yang

memegang jabatan tersebut. Selain itu, serangkaian pertanyaan lain dapat menguji pengetahuan tentang posisi partai-partai besar dalam isu-isu kunci serta praktik konstitusional dan institusional dasar, seperti interval waktu antara pemilihan umum, komposisi komite legislatif, atau kekuasaan khusus dari pemerintah daerah.

- 2) Kecakapan kognitif diperoleh dari materi pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di sekolah. Untuk mengukur tingkat penguasaan kecakapan kognitif ini, digunakan beberapa indikator sebagai berikut.:
 - a) Dapat menjelaskan pentingnya ideologi politik dan perkembangannya, dan bagaimana ideologi mempengaruhi pandangan dalam berbagai kondisi sosial,
 - b) Mengetahui pengetahuan yang luas tentang bagaimana kondisi negara saat ini dan mampu membuat perbandingan dengan kondisi negaranegara lain,
 - c) Tahu apa pengaruh kondisi ekonomi komunitas, perusahaan dan individu,
 - d) Dapat menempatkan ekonomi, pembangunan politik dan sosial dalam perspektif sejarah,
 - e) Dapat Mempertimbangkan hubungan internasional dan kondisi global dari ekonomi, politik, aspek hukum dan budaya serta menjadi sadar kondisi untuk melakukan kerja sama internasional untuk tujuan politik dan sarana kebijakan keamanan,
 - f) Dapat menggunakan berbagai sumber pengetahuan dan alat untuk menganalisis dan mendiskusikan isu-isu sosial, menggunakan pendekatan yang berbeda, dan dalam seperti cara memperkuat pendapat sendiri.

B. Kajian Penelitian Yang Relevan

1. Penelitian jurnal yang dilakukan oleh Dwi Ardiani, Dede Sri Kartini, Ari Ganjar Herdiansah pada tahun 2019 dengan judul “Strategi Sosialisasi Politik Oleh Kpu Kabupaten Ngawi Untuk Membentuk Pemilih Pemula Yang Cerdas Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Timur Tahun 2018 Di Kabupaten Ngawi”. Hasil dari penelitian ini adalah strategi sosialisasi politik yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Ngawi untuk membentuk pemilih pemula yang cerdas dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur termasuk perumusan strategi dan perencanaan jangka panjang, tahapan pemilihan tindakan menggunakan strategi serangan dan strategi persuasi dan tahap alokasi sumber daya organisasi menggunakan strategi penguatan. Perbedaan dengan penelitian ini adalah pada lokasi penelitian, target penelitian dan tujuan sosialisasi dimana judul penelitian saya bertujuan untuk membentuk *Civic literacy*, sedangkan judul ini bertujuan untuk membentuk pemilih pemula yang cerdas. Untuk persamaan penelitian yaitu sama-sama membahas tentang strategi sosialisasi KPU, menggunakan pendekatan kualitatif
2. Penelitian jurnal yang dilakukan oleh Ikman Nur Rahman pada tahun 2016 yang berjudul “Pengaruh *Civic literacy* Dalam Pembelajaran Pendidikan Kewargaengaraan Terhadap Partisipasi Politik Peserta didik”. Hasil dari penelitian ini yaitu bahwa pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan berpengaruh dalam mengembangkan kemelekawacanaan warga negara dan keterampilan partisipatorinya, sehingga dapat membuat partisipasi politik peserta didik menjadi lebih aktif. Perbedaan dengan penelitian ini adalah fokus penelitian dimana judul penelitian saya fokus dan subject pada pengaruh sosialisasi politik KPU terhadap pembentukan *Civic literacy* peserta didik, sedangkan judul ini fokus pada pengaruh *Civic literacy* dalam pembelajaran PKn terhadap partisipasi politik peserta didik. Untuk persamaan penelitian yaitu sama-sama membahas tentang *Civic literacy* dan kesamaan dalam meneliti di lingkup Sekolah Menengah Atas (SMA).

3. Penelitian jurnal yang dilakukan oleh Raharjo pada tahun 2018 yang berjudul “Urgensi *Civic literacy* Bagi Generasi Milenial”. Hasil dari penelitian ini yaitu bahwa literasi kewarganegaraan merupakan hal yang sangat penting dan diperlukan masyarakat dalam rangka menghadapi kemajuan era digital saat ini. Hal ini untuk mengoptimalkan dampak positif dari adanya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, lebih utama yaitu untuk menghindari dampak negatif dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Perbedaan dengan penelitian ini adalah pada fokus penelitian dimana judul penelitian saya fokus pada pengaruh sosialisasi politik KPU terhadap pembentukan *Civic literacy* peserta didik SMA, sedangkan judul ini fokus pada pengaruh berfokus pada pentingnya literasi kewarganegaraan bagi generasi muda/milenial. Untuk persamaan penelitian yaitu secara garis besar, kedua judul penelitian tersebut memiliki kesamaan dalam hal mengkaji pentingnya *Civic literacy*, namun dengan fokus penelitian yang berbeda.
4. Penelitian jurnal yang dilakukan oleh Armaidi Armawi pada tahun 2021 yang berjudul “Evaluasi Program Sosialisasi *Civic literacy* dalam Pembentukan Etika Warganegara Muda di Kota Surakarta”. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa sosialisasi *Civic literacy* dilakukan secara informal dengan pembiasaan, pengembangan, dan pembelajaran secara berkelanjutan memiliki tujuan untuk membentuk etika warganegara berperspektif ketahanan pribadi. Perbedaan dengan penelitian ini adalah pada fokus penelitian dimana judul penelitian saya fokus pada pengaruh sosialisasi politik KPU terhadap pembentukan *Civic literacy* peserta didik SMA, sedangkan judul ini berfokus pada evaluasi program sosialisasi *Civic literacy* dalam pembentukan etika warganegara muda di Kota Surakarta. Untuk persamaan penelitian yaitu secara garis besar, kedua judul penelitian tersebut memiliki kesamaan dalam hal mengkaji pentingnya *Civic literacy* , namun dengan fokus penelitian yang berbeda.
5. Penelitian skripsi yang dilakukan Oleh Muhammad Adeputera Hemas pada tahun 2019 dengan judul "Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam

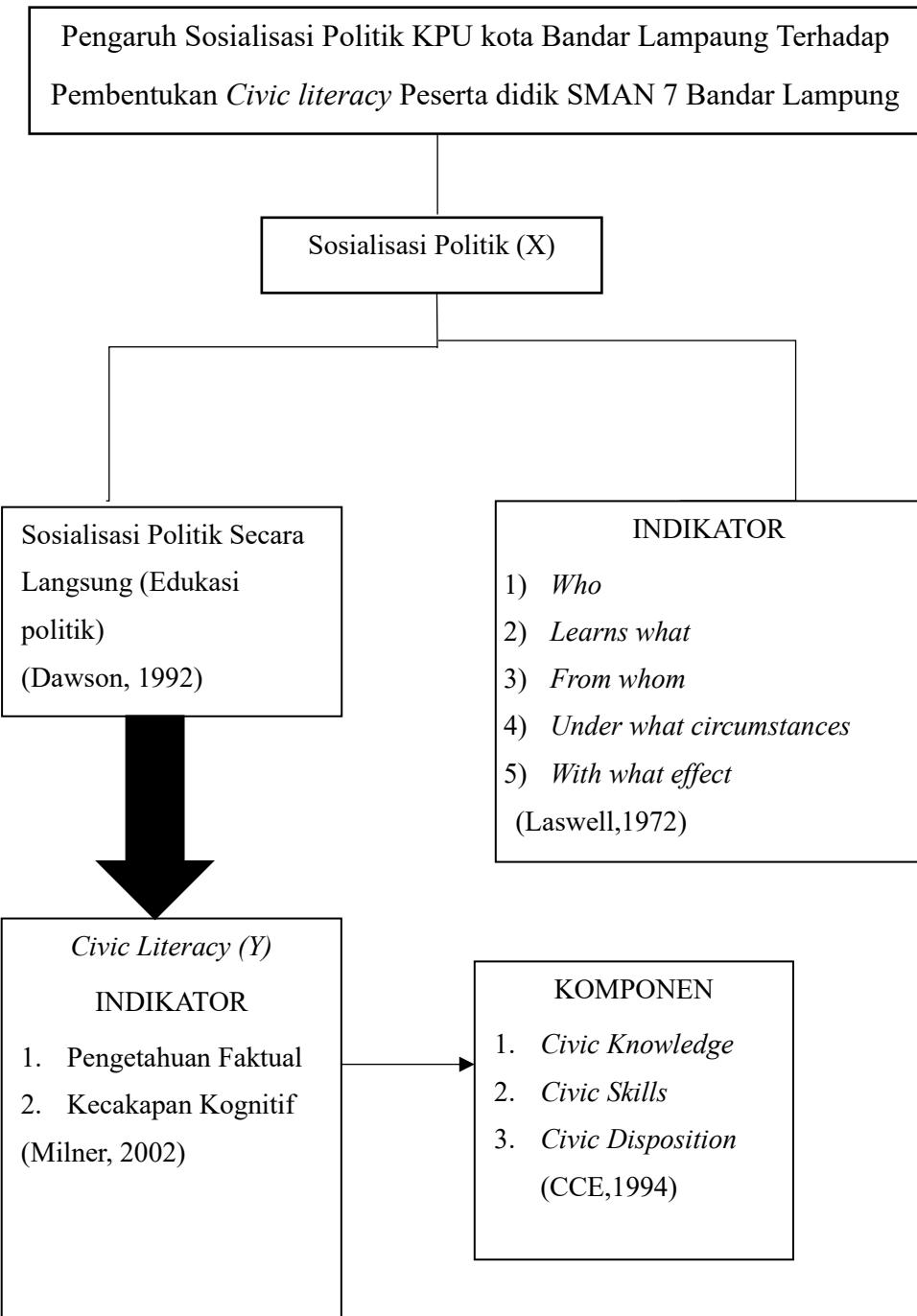
Melaksanakan Pendidikan Politik untuk Meningkatkan Partisipasi Aktif Pemilih Pemula pada Pilkada Tahun 2015 di Kabupaten Kendal". Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peran KPU Kabupaten Kendal dalam melaksanakan pendidikan politik bagi pemilih pemula yaitu dengan melakukan program sosialisasi. Bentuk pendidikan politik KPU Kabupaten Kendal telah melaksanakan pendidikan politik berupa sosialisasi ke sekolah- sekolah. Perbedaan dengan penelitian ini yakni perbedaan pertama terletak pada fokus penelitian, di mana judul saya berfokus pada Pengaruh sosialisasi politik KPU Kota Bandar Lampung terhadap pembentukan *Civic literacy* di SMAN 7 Bandar Lampung, sementara judul kedua berfokus pada peran KPU Kabupaten Kendal dalam melaksanakan pendidikan politik untuk partisipasi aktif pemilih pemula pada Pilkada 2015. Perbedaan kedua adalah objek penelitian, di mana judul pertama berfokus pada *Civic literacy* peserta didik SMA, sedangkan judul kedua berfokus pada partisipasi aktif pemilih pemula. Namun, penelitian ini memiliki persamaan, yaitu penelitian memiliki persamaan dalam hal meneliti peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam melaksanakan pendidikan/edukasi/sosialisasi politik untuk membentuk partisipasi dan literasi politik masyarakat.

6. Penelitian Jurnal yang dilakukan oleh Veronica Aditya Rahayu Ningtyas yang berjudul "Sosialisasi Pendidikan Politik Bagi Pemilih Pemula di SMA Kristen Petra 5 Kota Surabaya". Hasil dari penelitian ini yaitu menunjukkan peningkatan pemahaman siswa terhadap konsep dasar pemilu, proses pelaksanaan, serta pentingnya memilih secara bijak. Perbedaan dengan penelitian ini adalah fokus penelitian saya *Civic literacy*, sedangkan judul ini fokus pada pemahaman pemilu dan partisipasi politik. Untuk persamaan penelitian yaitu sama-sama membahas tentang Sosialisasi politik bagi pemilih pemula dan kesamaan subject penelitian di lingkup Sekolah Menengah Atas (SMA).

C. Kerangka Berpikir

Penelitian ini mencari tahu bagaimana pengaruh sosisasliasi politik oleh komisi pemilihan umum (KPU) Kota Bandar lampung dalam upaya untuk membentuk *Civic literacy* pada peserta didik SMAN 7 Bandar Lampung. Menurut Dawson dalam pelaksanaan sosialisasi politik menggunakan metode langsung. Dalam pelaksanaan sosialisasi perlu memperhatikan 5 point penting sesuai dengan teori Model Harold Lasswell yang dalam melaksanakan sosialisasi politik perlu membahas lima point; *(a) who, (b) learns what, (c) from whom, (d) under what circumstances, and (e) with what effects*. Melalui teori ini dapat diketahui bahwa unsur *who* adalah Siswa SMAN 7 Bandar Lampung, unsur *learns what* berupa materi dalam membentuk *Civic literacy*, Unsur *from whom* berupa KPU Kota Bandar Lampung, unsur *under what circumstances* berupa sosialisasi politik, unsur *with what effect* untuk mengetahui pembentukan *Civic literacy* peserta didik SMAN 7 Bandar Lampung.

Selanjutnya, dalam menentukan keterkaitan antara variable X ke Variabel Y mempelukan pemahaman terhadap komponnen *Civic literacy* yang terbagi menjadi 3, *(a) Civic Knowledge, (b) Civic Skills, (c) Civic Disposition*. Selaras dengan itu untuk mengukur *Civic literacy* menggunakan metode survey dengan menggunakan model teori Milner yang dipergunkana untuk *Civic literacy* terdapat 2 indikator, yaitu (a) pengatahan faktual, untuk indikator pengetahuan faktual materi didalamnya mengenai sistem politik, pemerintahan negara saat ini, serta kegiatan soisallisasi politik di sekolah, (b) kecakapan kognitif, untuk indikator kecakapan kognitif didalamnya mengenai pembelajaran PPKn seperti membandingkan isu-isu sosial. Berdasarkan uraian tersebut maka dapat dilihat melalui kerangka pikir berikut ini:



Gambar 2.1 Kerangka Berpikir

III. METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian adalah metode survey dengan pendekatan kuantitatif. Penelitian kuantitatif menurut Sugiyono (2019), adalah suatu metode penelitian yang berdasarkan pada filsafat positivisme, sebagai metode ilmiah atau scientific karena telah memenuhi kaidah ilmiah secara konkret atau empiris, obyektif, terukur, rasional, serta sistematis. Dalam penelitian ini menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpulan data. Metode survey dipilih untuk mengetahui sosialisasi politik oleh KPU yang berperan terhadap *Civic literacy peserta didik*. Menurut Sugiyono (2018) metode survey adalah metode penelitian kuantitatif yang digunakan untuk mendapatkan data yang terjadi pada masa lampau atau saat ini, tentang keyakinan, pendapat, karakteristik, perilaku hubungan variabel dan untuk menguji beberapa hipotesis tentang variabel sosialogi dan psikologis dari sampel yang diambil dari populasi tertentu , teknik pengumpulan data dengan pengamatan (wawancara dan kuesioner) yang tidak mendalam, dan hasil penelitian cendrung untuk di generasikan.

B. Populasi dan Sampel

1.Populasi

Populasi adalah hal yang sangat penting dalam penelitian karena merupakan sumber informasi. populasi dapat diartikan sebagai keseluruhan elemen dalam penelitian meliputi objek dan subjek dengan ciri-ciri dan karakteristik tertentu sehingga dapat menjadi kesimpulan dari hasil akhir penelitian. Berdasarkan definisi tersebut yang menjadi populasi penelitian ini adalah Peserta kegiatan sosialisasi yakni pengurus OSIS 2024/2025 SMAN 7 Bandar Lampung.

Berikut rincian populasi peserta didik SMAN 7 Bandar Lampung:

Tabel 3.1 Populasi Pengurus OSIS SMAN 7 Bandar Lampung Tahun Ajaran 2024/2025.

| No | Seksi | Jumlah Peserta didik |
|--------|--------------------------------------------------------------|----------------------|
| 1 | Ketua | 3 |
| 2 | Sekretaris | 3 |
| 3 | Bendahara | 2 |
| 4 | Sekbid 1 (Ketaqwaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa) | 3 |
| 5 | Sekbid 2 (Kehidupan Berbangsa dan Bernegara) | 4 |
| 6 | Sekbid 3 (Pendidikan Pendahuluan Bela Negara) | 4 |
| 7 | Sekbid 4 (Kepribadian dan Budi Pekerti Luhur) | 4 |
| 8 | Sekbid 5 (Berorganisasi Pendidikan Politik dab Kepemimpinan) | 4 |
| 9 | Sekbid 6 (Keterampilan dan Kewirausahaan) | 3 |
| 10 | Sekbid 7 (Kesegaran Jasmani dan Daya Kreasi) | 3 |
| 11 | Sekbid 8 (Presepsi, Apresiasi, dan Kreasi) | 4 |
| 12 | Sekbid 9 (Teknologi dan Informatika) | 4 |
| 13 | Sekbid 10 (Kemampuan Berbahasa Inggris) | 3 |
| Jumlah | | 44 |

*Sumber: Surat Keputusan Pengurus OSIS 12 SMAN 7 Bandar Lampung
Tahun ajaran 2024/2025*

2. Sampel

Sampel secara sederhana diartikan sebagai bagian dari populasi yang menjadi sumber data yang sebenarnya dalam suatu penelitian. Dengan kata lain, sampel adalah sebagian dari populasi untuk mewakili seluruh populasi. Sampel merupakan sebagian atau wakil dari populasi yang akan

diteliti oleh peneliti (Arikunto, 2019). Maka, dapat disimpulkan bahwa sampel adalah wakil atau sebagian dari populasi yang memiliki sifat dan karakteristik yang sama bersifat representatif dan menggambarkan populasi sehingga dianggap dapat mewakili semua populasi yang diteliti. Apabila subjek kurang dari 100 lebih baik diambil semua sehingga penelitiannya merupakan penelitian populasi, selanjutnya jika jumlah subjeknya lebih dari 100 dapat diambil antara 10-15% atau 20-25% atau lebih (Arikunto, 2019).

Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah sensus atau sampling total. Menurut (Sugiyono, 2009) Total sampling adalah teknik pengambilan sampel dimana jumlah sampel sama dengan populasi. Teknik ini digunakan karena pertimbangan dalam penelitian ini semua populasi dalam penelitian dijadikan sampel yang berjumlah 44 peserta didik

C. Variabel Penelitian

Menurut Sugiyono (2016), variabel penelitian adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya. Pada penelitian ini variabel yang digunakan peneliti sebagai berikut;

1. Variabel Bebas

Menurut Sugiyono (2016), variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat). Dalam penelitian ini, yang menjadi variabel bebas (x) pada penelitian ini adalah Sosialisasi Politik.

2. Variabel Terikat

Menurut Sugiyono (2016), variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau menjadi akibat, karena adanya variable bebas. Dalam penelitian ini, yang menjadi variabel terikat (y) adalah *Civic literacy* peserta didik SMAN 7 Bandar Lampung.

D. Definisi Konseptual dan Operasional

1. Definisi Konseptual

Berdasarkan landasan teori Variabel X Sosialisasi Politik, Variabel Y *Civic literacy* yang telah dipaparkan di atas, dapat dikemukakan definisi konseptual dari masing-masing variabel, sebagai berikut:

a. Sosialisasi Politik

Sosialisasi Politik adalah suatu proses untuk memberikan pengetahuan terhadap seorang atau kelompok masyarakat mengenai sistem politik agar masyarakat memiliki kesadaran untuk ikut serta dalam kehidupan politik

b. Civic literacy

Civic literacy adalah sebagai bentuk pengetahuan politik warga negara yang nantinya dapat dimanfaatkan dalam berbagai kegiatan kewarganegaraan. *Civic literacy* mencakup pemahaman tentang sistem pemerintahan, hak dan kewajiban sebagai warga negara, serta kemampuan untuk terlibat dalam proses politik dan pembuatan kebijakan.

2. Definisi Operasional

Definisi operasional dalam variabel penelitian ialah suatu atribut atau sifat atau nilai dari objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang telah ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan nya (Sugiyono,2015).

a. Sosialisasi Politik

Indikator Sosialisasi Politik sebagai berikut:

- 1) *Who*
- 2) *Learns what*
- 3) *From whom*
- 4) *Under what circumstances*
- 5) *With what effect*

b. Civic literacy

Indikator *Civic literacy* sebagai berikut:

- 1) Pengetahuan faktual (*Factual Knowledge*)
- 2) Kecakapan kognitif (*Cognitive Proficiency*)

E. Rencana Pengukuran Variabel

Rencana pengukuran variabel pada penelitian ini adalah menggunakan angket. Angket berisikan pertanyaan-pertanyaan yang akan diberikan kepada peserta didik untuk dijawab sesuai dengan keadaan individu peserta didik masing-masing. Pada penelitian ini variabel yang akan diukur adalah variabel sosialisasi politik (X) dan variabel *Civic literacy* (y).

F. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono (2019), teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai setting, berbagai sumber, dan berbagai cara. Adapun teknik pengumpulan data pada penelitian ini ialah:

1. Teknik Pokok

a. Angket

Angket merupakan metode pengumpulan data yang telah dilakukan dengan cara memberikan beberapa macam pertanyaan yang berhubungan dengan masalah penelitian. (Prawiyogi et al., 2021). Angket yang digunakan adalah angket tertutup, yaitu pertanyaan yang sudah disertai alternatif jawaban yang harus dipilih oleh responden. Penelitian ini menggunakan teknik angket untuk mengumpulkan data dan informasi dari responden yang bersangkutan yaitu peserta sosialisasi peserta didik kelas 12 SMAN 7 Bandar Lampung tahun pelajaran 2024/2025. Peneliti memilih teknik angket agar lebih memudahkan peneliti dalam mengumpulkan data. Penelitian ini menggunakan skala *Likert*. (Sugiyono, 2014) mengemukakan bahwa skala *Likert* digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi orang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Sehingga intrument penelitian dengan skala *Likert* dapat

dibuat dalam bentuk pilihan ganda maupun *checklist*. Instrument penelitian ini dibuat dalam bentuk *checklist*, yang setiap jawaban diberikan bobot nilai yang bervariasi. Variasi nilai atau skor dari masing-masing jawaban dengan kriteria sebagai berikut :

- 1) Untuk alternatif jawaban setuju, diberi nilai atau skor tiga (3).
- 2) Untuk alternatif jawaban netral diberi nilai atau skor dua (2)
- 3) Untuk alternatif jawaban tidak setuju diberi nilai atau skor satu (1)

2. Teknik Penunjang

a. Wawancara

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Sugiyono (Prawiyogi et al., 2021). Maka itu, wawancara adalah sebuah proses pengajuan pertanyaan yang diajukan kepada narasumber guna mengumpulkan data yang mendukung untuk peneliti dalam melakukan kegiatan penelitian.

Teknik wawancara ini digunakan sebagai penunjang dalam penelitian untuk mengumpulkan data tambahan. Peneliti melakukan wawancara secara langsung di SMAN 7 Bandar Lampung dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan menyiapkan kisi-kisi penunjang dalam mencari data-data yang ingin peneliti ketahui. Pertanyaan yang diajukan peneliti yaitu berkaitan dengan pelaksanaan sosialisasi politik (x) dan *Civic literacy* (y).

G. Uji Validitas dan Reliabilitas

1. Uji Validitas

Menurut Sugiyono (2017) instrumen yang valid berarti alat ukur yang digunakan untuk mendapatkan data (mengukur) itu valid. Valid berarti instrumen tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur. Penelitian ini memiliki dua variabel yaitu sosialisasi politik (x) dan *Civic literacy* (y). Cara mengukur variabel konstruk yaitu mencari korelasi

antara masing-masing pertanyaan dengan skor total menggunakan rumus teknik korelasi *pearson product moment*, sebagai berikut:

$$r_{xy} = \frac{N X Y (\Sigma X)(\Sigma Y)}{\sqrt{\{N\Sigma X^2 - (\Sigma X)^2\}\{N\Sigma Y^2 - (\Sigma Y)^2\}}}$$

Keterangan :

r_{xy} = Koefisien korelasi antara variabel X dan Y

X = Skor item

Y = Skor Total

N = Banyak Subjek/ Responded

Setelah mengetahui hasil dari rumus *pearson product moment*, kemudian peneliti juga melakukan pengujian kembali angket menggunakan uji dua sisi dengan taraf signifikansi 0,05 dengan kriteria pengambilan keputusan yaitu, jika $r_{hitung} \geq r_{tabel}$ maka instrument dinyatakan valid. Untuk memudahkan uji coba dalam penelitian ini maka dilakukan dengan menggunakan bantuan program *Statistical Product Service Solution (SPSS)*.

Kriteria diterima atau tidaknya suatu data valid atau tidak dalam program SPSS (Prayitno, 2012).

Berdasarkan nilai korelasi :

- a) Jika $r_{hitung} > r_{tabel}$, maka item dinyatakan valid
- b) Jika $r_{hitung} < r_{tabel}$, maka item dinyatakan tidak valid

2. Uji Reliabilitas

Menurut Sugiyono (2017) instrumen yang reliabel adalah instrumen yang bila digunakan beberapa kali untuk mengukur objek yang sama, akan menghasilkan data yang sama. Penelitian ini menggunakan teknik *alpha cronbach* dengan bantuan spss. Uji reliabilitas yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan metode *Cronbach's Alpha* dengan rumus sebagai berikut :

$$r_{11} = \left[\frac{k}{k-1} \right] \left[1 - \frac{\sum a^2 b}{a^2 t} \right]$$

Keterangan :

r_{11} = koefisien reliabilitas alpha

k = jumlah item pertanyaan

$\sum \alpha^2 b$ = jumlah varian butir

$\alpha^2 t$ = varians total

Menurut Siregar (2018) bahwa suatu kuesioner dapat dikatakan reliabel dengan menggunakan teknik ini, bila koefisien reliabilitas (r_{11}) $> 0,6$. Beberapa peneliti berpengalaman merekomendasikan dengan cara membandingkan nilai dengan tabel kriteria indeks koefisien pada tabel berikut ini:

Tabel 3.2 Indeks Koefisien Reliabilitas

| No | Nilai Interval | Kriteria |
|----|----------------|---------------|
| 1 | <0,20 | Sangat Rendah |
| 2 | 0,20 – 0,399 | Rendah |
| 3 | 0,40 – 0,599 | Cukup |
| 4 | 0,60 – 0,799 | Tinggi |
| 5 | 0,80 – 1,00 | Sangat Tinggi |

Sumber: Wibowo (2012)

Nilai reliabilitas dapat dicari dengan membandingkan nilai *cronbach's alpha* pada perhitungan SPSS dengan nilai r_{tabel} menggunakan uji satu sisi pada taraf signifikansi 0.05 (SPSS secara default menggunakan nilai ini) dan df= N-k, df=N-2, N adalah banyaknya sampel dan k adalah jumlah variabel yang diteliti, kriteria reliabilitasnya yaitu (Wibowo, 2012)

- a) Jika $r_{hitung} (r_{alpha}) > r_{tabel} df$ maka butir pertanyaan/pernyataan tersebut reliabel.
- b) Jika $r_{hitung} (r_{alpha}) < r_{tabel} df$ maka butir pertanyaan/pernyataan tersebut tidak reliabel.

H. Teknik Analisis Data

1. Analisis Data Frekuensi

Analisis data frekuensi dilakukan terhadap hasil pengambilan data dari angket (Sosialisasi politik dan *Civic literacy*). Analisis distribusi frekuensi dilakukan untuk mengetahui klasifikasi beserta presentase tingkat pengaruh sosialisasi politik KPU terhadap *Civic literacy* peserta didik SMAN 7 Bandar Lampung. Persamaan analisis distribusi Wahab (2021) sebagai berikut:

$$I = \frac{NT - NR}{K}$$

Keterangan :

I = interval

NT = nilai tertinggi

NR = nilai terendah

K = kategori

Kemudian, untuk mengtahui tingkat presentase digunakan rumus presentase sebagai berikut :

$$P = \frac{F}{N} \times 100\%$$

Keterangan :

P = Presentase

F = Frekuensi pada klasifikasi atau kategori variable yang bersangkutan

N = Jumlah frekuensi dari seluruh klasifikasi kategori variabel

Menurut Arikunto (Saifudin,2016) untuk mengetahui banyaknya presentase yang diperoleh maka digunakan dengan kriteria. sebagai berikut:

Tabel 3.3 Persentase data frekuensi

| Skor (%) | Kategori |
|----------|-------------|
| 76-100 % | Baik |
| 56-75 % | Cukup |
| 40-55 % | Kurang Baik |
| 0-39 % | Tidak Baik |

Sumber: Arikunto (Saifudin, 2016)

2. Uji Prasyarat

a. Uji Linearitas

Uji linearitas digunakan untuk mengetahui apakah sosialisasi politik KPU (variabel X) dan *Civic literacy* peserta didik (variabel Y), memiliki hubungan yang linear secara signifikan atau tidak. Uji linearitas dilakukan menggunakan SPSS untuk memperoleh koefisien signifikansinya. Dasar pengambilan keputusan hasil uji linearitas adalah sebagai berikut:

- a) Jika nilai $\text{Sig.} > 0,05$, maka ada hubungan yang linear secara signifikan antara variabel X dan variabel Y.
- b) Jika nilai $\text{Sig.} < 0,05$, maka tidak ada hubungan yang linear secara signifikan antara variabel X dan variabel Y.

3. Analisis Data

a. Uji Regresi Linear Sederhana

Selanjutnya dalam penelitian ini akan diujikan menggunakan rumus regresi linier. Untuk mempermudah dalam uji linieritas maka pada penelitian ini menggunakan daftar analisis varian (*anova*) dengan ketentuan apabila $F_{\text{hitung}} \leq F_{\text{tabel}}$ pada taraf 5% dengan dk pembilang ($k-2$) dan dk penyebut ($n-k$), maka regresi linier.

Data hasil dari analisis regresi ini digunakan untuk melihat pengaruh antara variabel X terhadap variabel Y, yaitu Pengaruh Sosialisasi politik KPU (X) Terhadap peningkatan *Civic literacy* peserta didik (Y). Adapun persamaan dari regresi linier adalah sebagai berikut :

$$Y = a + bX$$

Keterangan :

Y: Subjek pada variabel dependent

X: Prediktor

a: Harga *Y* ketika harga *X* = 0 (Harga Konstanta)

b: Koefisien regresi

b. Uji Koefisien Determinasi

Menurut Ghazali (2011) Uji koefisien determinasi (*R*) digunakan untuk mengetahui persentase sumbangan pengaruh serentak variabel-variabel bebas terhadap variabel terikat. Koefisien determinasi dapat dilihat dari nilai *adjusted R*² dimana untuk menginterpretasikan besarnya nilai koefisien determinasi harus diubah kedalam bentuk persentase. Sisa dari total (100%) yang artinya dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian. Koefisien determinasi bertujuan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen Nilai koefisien determinasi adalah $0 < R^2 < 1$. Jika nilai koefisien determinasi yang mendekati angka nol (0) berarti kemampuan model dalam menerangkan variabel terikat sangat terbatas. Sebaliknya apabila nilai koefisien determinasi variabel mendekati satu (1) berarti kemampuan variabel bebas dalam menimbulkan keberadaan variabel terikat semakin kuat. Uji koefisien determinasi dilakukan untuk mengetahui besarnya kontribusi atau pengaruh variabel X terhadap Y dan dapat menggunakan rumus sebagai berikut :

$$KD = (R^2) \times 100\%$$

Keterangan :

KD = Nilai Koefisien Determinasi

R = Nilai Koefisien Korelasi

Adapun Pedoman interpretasi Koefisien Determinasi, sebagai berikut;

Tabel 3.4 Pedoman interpretasi Koefisien Determinasi

| Interval koefisien (%) | Tingkat Pengaruh |
|------------------------|------------------|
| 0% - 19,9% | Sangat Lemah |
| 20% - 39,9% | Lemah |
| 40% - 59,9% | Sedang |
| 60% - 79,9% | Kuat |
| 80% - 100% | Sangat Kuat |

Sumber: Sugiyono (2016)

V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian yang dilakukan peneliti mengenai pengaruh sosialisasi politik Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bandar Lampung terhadap pembentukan *civic literacy* peserta didik SMAN 7 Bandar Lampung, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh positif dari sosialisasi politik (Variabel X) terhadap pembentukan *Civic literacy* peserta didik (Variabel Y). Hal ini dapat dilihat dari hasil analisis koefisien determinasi variabel X dan variabel Y yang mengartikan bahwa terdapat pengaruh sosialisasi politik (X) terhadap *Civic literacy* (Y) sebesar 62,4% dan sisanya sebesar 37,6% dipengaruhi oleh faktor lain di luar sosialisasi politik. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sosialisasi politik yang dilakukan KPU Kota Bandar Lampung berperan dalam mempengaruhi pembentukan *Civic literacy* peserta didik SMAN 7 Bandar Lampung.

Penelitian ini termasuk dalam ruang lingkup ilmu Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, dengan wilayah kajian Pendidikan Politik dan Kenegaraan. Sosialisasi politik berpengaruh terhadap pembentukan *Civic literacy* peserta didik melalui metode penyampaian yang interaktif seperti simulasi pemilu, diskusi, serta kolaborasi dengan sekolah dalam integrasi materi dengan Projek P5 "Suara Demokrasi". Dengan adanya sosialisasi ini, peserta didik tidak hanya memperoleh pengetahuan faktual tentang sistem politik dan pemilu, tetapi juga mengembangkan kecakapan kognitif untuk menganalisis informasi secara kritis

dan berpartisipasi dalam proses demokrasi. Oleh karena itu, KPU dan sekolah perlu memastikan bahwa program sosialisasi politik terus dilaksanakan secara berkelanjutan dan konsisten agar dapat membentuk *Civic literacy* pada peserta didik.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengaruh sosialisasi politik KPU terhadap pembentukan *civic literacy* peserta didik di SMAN 7 Bandar Lampung, peneliti memberikan beberapa saran yang ditujukan kepada berbagai pihak terkait, sebagai berikut:

1. Bagi Sekolah

Bagi Sekolah diharapkan dapat mengintegrasikan materi sosialisasi KPU ke dalam Pembelajaran PPKn, sehingga hal ini dapat memberikan pijakan yang lebih kuat dan memadai untuk pemahaman politik peserta didik, serta sekolah diharapkan dapat lebih memaksimalkan pemilihan OSIS, debat kandidat, dan kotak aspirasi sebagai laboratorium demokrasi nyata. Proses ini harus dikelola dengan transparan dan partisipatif untuk memberikan pengalaman langsung (*political experience*) yang berharga bagi peserta didik.

2. Bagi Komisi Pemilihan Umum

Bagi KPU diharapkan untuk mengembangkan materi sosialisasi yang lebih adaptif dengan generasi Z dengan menyederhanakan istilah teknis dan memperbanyak konten digital interaktif pada platform media sosial yang populer. Keberlanjutan program juga perlu ditingkatkan dengan memastikan aksesibilitas dan pembaruan informasi.

3. Bagi Penelitian selanjutnya

Bagi Peneliti selanjutnya diharapkan dapat memperdalam penelitian melalui cakupan objek dan variabel yang lebih luas atau besar.

DAFTAR PUSTAKA

- Affandi, I. 2012. *Pendidikan Politik*. Bandung: Mutiara Press.
- Agustina, A., Adha, M. M., & Mentari, A. 2023. Pengaruh Literasi Digital Terhadap Etika Bermedia Sosial Peserta Didik. *Mindset: Jurnal Pemikiran Pendidikan dan Pembelajaran*, 3(2), 52–64.
- Apriyani, W., Adha, M. M., & Siswanto, E. 2024. Pengaruh Kesadaran Politik terhadap Partisipasi Politik pada Pemilihan Kepala Kampung Bakung Udk Kabupaten Tulang Bawang. *Sosial Simbiosis: Jurnal Integrasi Ilmu Sosial dan Politik*, 1(4), 66-86.
- Ardiani, D., Kartini, D. S., & Herdiansyah, A. G. 2019. Strategi Sosialisasi Politik Oleh Kpu Kabupaten Ngawi Untuk Membentuk Pemilih Pemula yang Cerdas Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Tahun 2018 Di Kabupaten Ngawi. *Jurnal Socius: Journal of Sociology Research and Education*, 6(1), 18-32.
- Arikunto. S. 2006, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta,
- Armawi, A., & Raharjo, R. 2021. Evaluasi Program Sosialisasi Civic literacy Dalam Pembentukan Etika Warganegara Muda. *Jurnal Filsafat*, 31(1), 1-23.
- Armadina, M. S. F. 2024. Strategi Peningkatan Civic literacy Terhadap Peningkatan Partisipasi Peserta didik Dalam Perkembangan Global 5.0 Pada Era Society. In *Prosiding Seminar Nasional PPKn FKIP UNS* (Vol. 7, No. 1, pp. 189-196).
- Bahri, S. Y., Juhad, M., Affandy, Y., Santhi, N. H., & Wijaya, S. A. 2023. Strategi Sosialisasi dan Pelatihan Inovatif untuk Meningkatkan Aktivitas Politik dan Partisipasi Generasi Z dalam Kebijakan Publik. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia (JPMI)*, 1(2), 128-136.
- Damsar. 2010. *Pengantar Sosiologi Politik*. Lampung: Kencana Prenada.
- Dawson, Richard E. et. al. 1977. *An Analytic Study Political Socialization*. Boston: Little, Brown and Company.
- Dewi, R. S., Kamal, N., Atiah, S., Mulyati, A., Hidayatullah, M. A., & Nugroho, F. E. 2022. Efektivitas Saung Bewara Pemilu Sebagai Sarana Pendidikan Politik Bagi Pemilih Pemula Di Kota Bandung. *Jurnal Kewarganegaraan*, 6(1), 1669-1677.
- Gil Jr, T. O., & Domingo, L. L. B. 2021. Assessing Civic literacy in Elementary Social Studies amidst the Pandemic. *Asian Journal of Education and Social Studies*, 24(2), 54-63.

- Laswel, H. D. 1972. *Politics: Who Gets What, When, How* Newyork: World Publishing Company.
- Haryanto. 2018. *Sosialisasi Politik: Suatu Pemahaman Awal*. Yogyakarta: Research Centre for Politics and Government (PolGov).
- Hartino, A. T., Adha, M. M., Ulpa, E. P., Rifai, A., & Rhosita, R. 2021. Efektivitas Pembelajaran Daring Dalam Meningkatkan Literasi Digital.
- Hidayah, Y., & Sunarso,S. 2017. Penguasaan Civic Skills Aktivis Badan Eksekutif Mahasiswa (Studi di Universitas Negeri Yogyakarta). *Harmoni Sosial: Jurnal Pendidikan IPS*, 4(2),153–164
- Kenneth P. Langton. 1969, *Political Socialization* (London: Oxford University Press, inc.).
- Kolb, D. A. 1984. *Experiential Learning: Experience as The Source of Learning and Development*. Englewood Cliffs, Nj: Prentice Hall.
- Kurniawan, D. 2023. Increasing Literacy and Education Beginner Voter. *JOELS: Journal of Election and Leadership*, 4(1), 65-76.
- Marlina, L. 2019. Peranan pembelajaran pendidikan kewarganegaraan dalam meningkatkan keberanian mengemukakan pendapat siswa. *Jurnal Civic Education: Media Kajian Pancasila dan Kewarganegaraan*, 3(1), 58-70.
- Maulana, A. Z. 2022. Pengaruh Perilaku Politik dalam Kehidupan Berorganisasi Mahasiswa. *De Cive: Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 2(3), 120-134.
- Maxwell, B., McDonough, K., & Waddington, D. I. 2018. Broaching the subject: Developing law-based principles for teacher free speech in the classroom. *Teaching and Teacher Education*, 70, 196-203.
- Milner, H. 2002 *Civic literacy (How Informed Citizens Make Democracy Work)*. Universityy Press of New England. United States of America (UPNE).
- Nababan, R., Pinem, U. J., & Purba, A. 2020. Hubungan Sosialisasi Politik Dengan Partisipasi Politik Dalam Pemilihan Kepala Daerah Di Kabupaten Dairi Kecamatan Gunung Sitember Tahun 2018. *Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 1(2), 1-12.
- Nisa, U., Hasan, M., Meiliza, Z., & Sjafei, S. 2025. Communication Strategy of the Independent Election Commission in Educating First-Time Voters. *Kanal: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 13(2), 164-176.
- Ningtyas,V. A .R. 2025. Efektivitas Simulasi Pemilu dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pemula di Surabaya. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 15(1), 78-95.

- Prawiyogi, A. G., Sadiah, T. L., Purwanugraha, A., & Elisa, P. N. 2021. Penggunaan media big book untuk menumbuhkan minat membaca di sekolah dasar. *Jurnal Basicedu*, 5(1), 446-452.
- Putri, T. L. D., Adha, M. M., & Putri, D. S. 2023. Pengaruh Pembelajaran Daring terhadap Literasi Baca dan Kompetensi Kewarganegaraan Mahasiswa. *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Pedagogi: Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran*, 3(1), 24-29.
- Putri, T. L. D., Handriyanto, H., Amalia, N., & Adha, M. M. 2021. *Civic literacy: Sebagai Upaya Dalam Mempersiapkan Warga Negara Menuju Era Society 5.0*.
- Rahman, I. N. 2016. Pengaruh *Civic literacy* dalam pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan terhadap partisipasi politik peserta didik. *Untirta Civic Education Journal*, 1(1).
- Schulz, W., Fraillon, J., Losito, B., Agrusti, G., Ainley, J., Damiani, V., & Friedman, T. 2023. *IEA international civic and citizenship education study 2022 assessment framework* (p. 133). Springer Nature.
- Sugiyono, 2013. *Metode penelitian pendidikan pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R&D*.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suryadi, K. 2010. *Inovasi nilai dan fungsi komunikasi partai politik bagi penguatan Civic literacy*. Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besat Ilmu Komunikasi Politik. Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung.
- Sutrisman, D. 2019. *Pendidikan Politik, Persepsi, Kepemimpinan, dan Mahasiswa*. Guepedia
- Tasary, D. 2013. Peran teman sebaya sebagai agen sosialisasi politik dalam menumbuhkan perilaku memilih remaja pada pemilihan walikota tahun 2011 RT 02 RW 01 Kecamatan Umbulharjo. *Jurnal Citizenship*, 2(2), 113-114.
- Yuliadari, E., Rusnaini, R., & Ariana, Y. 2018. Penguatan *Civic literacy* dalam Pembelajaran Demokrasi dan Pemilu dan Implikasinya Terhadap Civic Attitude Mahasiswa. *PKn Progresif: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Kewarganegaraan*, 13(2), 115-122.
- Ashari, M. 2023. Rapor Pendidikan Indonesia 2023: Kemampuan Literasi Siswa di Kategori Sedang, SMA Sederajat Alami Penurunan. *Pikiran Rakyat Media Network*. Diakses dari <https://www.pikiran-rakyat.com/pendidikan/pr-017168357/rapor-pendidikan-indonesia-2023-kemampuan-literasi-siswa-di-kategori-sedang-sma-sederajat-alami-penurunan?page=all>

- Annur, C.M. 2023. Survei Kic: Lebih Dari separuh Anak Muda Tertarik Dengan Politik: Databoks. *Katadata Media Network*. Diakses dari <https://databoks.katadata.co.id/politik/statistik/bfba81923ec1ae5/survei-kic-lebih-dari-separuh-anak-muda-tertarik-dengan-politik>
- Dinas Kominfo Provinsi Lampung. 2025. Pemerintah Provinsi Lampung Dorong Peningkatan Literasi dan Digitalisasi Kearsipan Untuk Generasi Cerdas Dan Berbudaya. *Pemerintah Provinsi Lampung*. Diakses dari <https://lampungprov.go.id/detail-post/pemerintah-provinsi-lampung-dorong-peningkatan-literasi-dan-digitalisasi-kearsipan-untuk-generasi-cerdas-dan-berbudaya?page=all>
- McLeod, S. A. 2016. *Albert Bandura's social learning theory*. Simply Psychology. Diakses dari <https://www.simplypsychology.org/bandura.html>
- Napitupulu, J. 2023. Pemilu 2024 di Bandar Lampung didominasi Pemilih Muda. *KIRKA.CO*. Diakses dari <https://kirka.co/pemilu-2024-di-bandar-lampung-didominasi-pemilih-muda/>